

LAPORAN TAHUNAN

Periode Tahun 2024

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

LAPORAN TAHUNAN

Periode Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

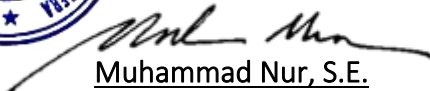
LAPORAN TAHUNAN
PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
Periode Tahun 2024

LAPORAN TAHUNAN ini telah disahkan dan disetujui di Karawang,
pada tanggal 24 April 2025



Disusun oleh:


Ir. Hendri Wirja Kusuma
Direktur Utama


Muhammad Nur, S.E.
Direktur YMFK


Aas Narsiah, S.M.
Direktur Operasional

Diketahui/setujui oleh,


Harry Danui
Komisaris Utama


Drg. Hengky Ganda Kusuma
Komisaris

Kata Pengantar

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dengan ini kami sampaikan Laporan Tahunan PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA merupakan laporan lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) periode tahun 2024, meliputi informasi umum dan laporan keuangan tahunan BPR. Laporan keuangan tahunan BPR telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan, dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan pedoman akuntansi BPR.

Pada periode 2024 ini, manajemen BPR telah berupaya untuk meningkatkan penerapan tata kelola BPR, antara lain: peningkatan modal disetor BPR menjadi Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta Rupiah), melengkapi jumlah anggota Direksi menjadi 3 (tiga) orang, pengangkatan pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan, sekaligus merangkap fungsi manajemen risiko dan penanggung jawab penerapan APU-PPT, dan pengangkatan pejabat eksekutif audit intern.

Secara umum kinerja keuangan BPR selama tahun 2024 meningkat dengan baik seiring dengan akuisisi yang dilakukan oleh PT Infiniti Investama Indonesia dengan melakukan penambahan modal pada 15 November 2024. Realisasi pos-pos penting seperti total aset, kredit yang diberikan, DPK dan laba-rugi telah melampaui target hingga akhir tahun atau tidak terdapat deviasi negatif terhadap RBB. Dalam hal ini pada akhir tahun 2024, Total aset menjadi sebesar Rp32,718,043 ribu (tumbuh 353,06% yoy), Kredit yang diberikan sebesar Rp4,521,944 ribu (tumbuh 39,58% yoy), Simpanan nasabah sebesar total Rp19,864,784 ribu (tumbuh 996,72% yoy), dan Laba tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp243,373 ribu (turun 32,11% yoy).

Penilaian tingkat kesehatan BPR secara mandiri pada akhir periode tahun 2024 dinilai sehat. Permodalan tumbuh baik dari tambahan setoran modal dan kenaikan laba tahun berjalan, dimana rasio KPMM adalah sebesar 148,21% dan rasio modal inti adalah 147,97%. Rasio NPL gross turun menjadi 1,08% dari tahun sebelumnya sebesar 4,39% dan BPR telah membentuk PPAP sebesar 100% dari PPAP yang wajib dibentuk. Kemampuan menghasilkan laba juga mengalami penurunan, dimana rasio ROA turun menjadi 2,65% dari tahun sebelumnya sebesar 5,58% dan BOPO naik menjadi 79,46% dari tahun sebelumnya sebesar 71,22%. Sementara itu, tingkat likuiditas dijaga pada rasio yang aman, yakni cash ratio sebesar 11,90% dan loan to ratio deposit (LDR) sebesar 23,04%.

Segenap Pengurus dan karyawan PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA berkomitmen untuk meneruskan tren pertumbuhan BPR yang sehat dan berkelanjutan di masa-masa mendatang.

Karawang, 24 April 2025

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
A. INFORMASI UMUM	1
1. Kepengurusan	1
a. Anggota Direksi	1
b. Anggota Dewan Komisaris	2
c. Pejabat Eksekutif	3
2. Kepemilikan	3
3. Perkembangan Usaha BPR	4
a. Riwayat Pendirian BPR	4
b. Ikhtisar Data Keuangan Penting	5
c. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan	6
d. Penjelasan Mengenai NPL termasuk Penyebab Utama NPL	7
e. Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap BPR dan Perubahan Penting Lain Pada Periode Laporan	7
4. Strategi dan Kebijakan Manajemen	8
a. Visi & Misi BPR	8
b. Arah Kebijakan BPR	8
c. Strategi Pengembangan Usaha	9
d. Kebijakan Tata Kelola	9
e. Kebijakan Manajemen Risiko	10
5. Laporan Manajemen	12
a. Struktur Organisasi	12
b. Bidang Usaha	13
c. Teknologi Informasi	13
d. Perkembangan dan Target Pasar	13
e. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor	15
f. Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain Dalam Rangka Pengembangan Usaha	15
g. Kepemilikan oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Dalam Kelompok Usaha BPR, dan Perubahan Kepemilikan Dari Tahun Sebelumnya	15

h. Keterkaitan antar pemilik, antar pengurus, dan antara pemilik dengan pengurus BPR	16
i. Sumber Daya Manusia (SDM)	16
j. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lainnya	17
k. Perubahan Penting Lainnya Yang Terjadi di BPR dan/atau Di Kelompok Usaha BPR Yang Mempengaruhi Operasional BPR Dalam Tahun Yang Bersangkutan	18
B. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	19
1. Laporan Posisi Keuangan	19
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	20
3. Laporan Perubahan Ekuitas	21
4. Laporan Arus Kas	21
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, Termasuk Informasi Tentang Komitmen Dan Kontinjensi ..	22
C. OPINI AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT	23
D. SELURUH ASPEK TRANSPARANSI DAN INFORMASI YANG DIWAJIBKAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI	23
E. SELURUH ASPEK PENGUNGKAPAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN DALAM STANDAR AKUNTASI KEUANGAN YANG BERLAKU BAGI BPR DAN PANDUAN AKUNTANSI BPR.....	24
1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan	24
2. Komitmen dan Kontinjensi	24
3. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang Berlaku bagi BPR dan PA BPR serta Peraturan Lainnya	24
4. Informasi Penting Lain	25
5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	25
F. PENGENDALIAN INTERNAL	25
G. LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	25
H. LAPORAN TRANSPARANSI PENANGANAN PENGADUAN YANG DITERIMA OLEH BPR.....	25
LAMPIRAN	26
LAMPIRAN 1.	
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN LENGKAP (<i>AUDITED</i>)	26
LAMPIRAN 2.	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	27
LAMPIRAN 3.	
LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2024	28

A. INFORMASI UMUM**1. Kepengurusan****a. Anggota Direksi****1) Ir. Hendri Wirja Kusuma, Direktur Utama**

Lahir di Teluk Betung, 22 Juni 1962, Meraih gelar Teknik Sipil dari Universitas Tarumanagara (1987). Menjabat sebagai Direktur Utama di PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA mulai tanggal 15 November 2024 untuk periode 5 (lima) tahun setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisiner OJK dengan surat Keputusan Nomor KEP-124/KO.12/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, merupakan Direksi di PT Moladin Finance Indonesia dh. PT Procar Finance Indonesia (2020-2023), Komisaris PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa (2018-2021), Komisaris Utama PT BPR Sarana Utama Multidana (2017-2018); Wakil Direktur Utama PT Bank Ganesha (2011-2015), Direktur Utama PT Bank Harda International (2000-2011), Kadiv Treasury PT Bank Pos Nusantara (1998-2000), Treasury di PT Bank Umum Nasional (1996-1998), PT Bank Mashill (1995-1996), PT Bank Dagang Nasional Indonesia (1989-1995).

2) Muhammad Nur, S.E., Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Lahir di Kota Baru, 11 Juli 1974. Pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi STIE Taman Siswa Jakarta (2014). Meraih diploma (D3) dari Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang, jurusan Teknik Komputer (1996). Menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA mulai tanggal 15 November 2024 untuk periode 5 (lima) tahun setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisiner OJK dengan surat Keputusan Nomor KEP-125/KO.12/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tanggal 15 November 2024, merupakan konselor di PT Infiniti Investama Indonesia (2023-2024), Pejabat Eksekutif di Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT di berbagai perusahaan yakni: PT Moladin Finance Indonesia dh. PT Procar Finance Indonesia (2021-2023), PT BPR Intidana Sukses Makmur (2019-2021), PT BPR Sarana Utama Multidana (2017-2019). Menempati berbagai posisi di PT Bank Ganesha, Tbk (1996-2017), antara lain: Kepala Bagian Operation Services & Development (2015-2017), Kepala Bagian Corporate Secretary (2012-2015), Kepala Bagian Financial Analysis & Operating Support (2008-2012), Kepala Seksi Financial Analysis & Operating Support (2007-2008) dan staff Financial Analysis & Operating Support (1996-2007).

3) Aas Narsiah, Direktur Operasional



Lahir di Karawang pada tanggal 20 Mei 1976. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Mitra Bangsa (dh. STIMA IMMI), Jakarta pada tahun 2002.

Memulai karir di Perseroan sebagai staff Akunting pada tahun 2005-2010, dan menjadi Kabag. Operasional mulai 2010-2015, hingga menjabat sebagai Direktur mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang. Menjabat sebagai Direktur Operasional di PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA mulai tanggal 15 November 2024 untuk periode 5 (lima) tahun. Ybs telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisiner OJK dengan surat Keputusan Nomor KEP-39/KR.21/2015 tanggal 25 Mei 2015.

b. Anggota Dewan Komisaris

1) Harry Danui, Komisaris Utama



Lahir di Ternate, 23 November 1960, Meraih gelar Bachelor of Business Administration dari Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada pada tahun (1984). Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tanggal 15 November 2024, merupakan Direksi di PT Moladin Finance Indonesia dh. PT Procar Finance Indonesia (2020-2023), Komisaris Independen di PT Jaya Trishindo, Tbk (2021-2023), Wakil Direktur Utama PT Paramita Bangun Sarana, Tbk (2018-2019), Komisaris Independen PT Paramita Bangun Sarana, Tbk (2016-2018); Komisaris Independen PT Hexindo Adiperkasa Tbk (2003-sekarang), Komisaris

Independen PT Mahaka Media Tbk (2016-2022), Direktur Keuangan PT Mahaka Media Tbk (2013-2016), Direktur Operasional PT RHB OSK Securities Indonesia (2011-2013), Manajer Emirates Airlines (2009-2011), Direktur PT Efata Papua Airlines (2004-2007), Direktur Keuangan PT Gunung Agung, Tbk (2002-2003), Direktur Operasional PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (2001-2002), berbagai posisi di PT Sigma Batara dengan posisi akhir Direktur Operasional (1994-2000), Direktur Operasional PT Standard Chartered Indonesia (1997), Manajer Keuangan PT Sun Hung Kai Securities Indonesia (1990-1993), dan Manajer Keuangan Supitron Pramesti Group (1984-1990).

2) Drg. Hengky Ganda Kusuma, Komisaris



Lahir di Tegal pada tanggal 10 Mei 1953. Menyandang gelar Dokter Gigi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1977. Memulai karir di perbankan dengan mendirikan PT BPR Mitra Telagasi Utama, pada tahun 1989. Menjabat sebagai Direktur PT BPR Mitra Telagasi Utama (1992-1994), dan kemudian menjabat sebagai Komisaris PT BPR Mitra Telagasi Utama mulai 1994 sd sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT BPR Bangun Mitra Wadas (1992-2013), Ketua Koperasi Bumi Mitra Wadas (2011-2018). Selain di perbankan,

Beliau juga aktif sebagai dokter gigi mulai tahun 1979 sampai dengan sekarang, baik di klinik sendiri, maupun di Klinik PDGI (2011- sekarang). Beliau juga pernah menjabat sebagai pegawai negeri sipil (1979-1989).

c. Pejabat Eksekutif

- 1) Ihsan Hadikusumah, PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT
 - Lahir di Bogor, 14 Agustus 1986.
 - Pendidikan terakhir adalah S1 Sastra Inggris, Universitas Pakuan, Bogor, 2011.
 - Bergabung di PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera mulai 15 November 2024 sebagai PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT.
 - Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja pada PT Moladin Finance Indonesia (dh PT Pro Car International Finance) dengan berbagai posisi, yakni: Compliance Officer (2022-2023); Liaison Officer (2019-2022); Data Center Managemen (2017-2019); Training & Development Staff (2015-2017); HR Staff (2012-2015).
- 2) Riswanto, PE Kredit
 - Lahir di Banyumas, 26 Mei 1970.
 - Pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, 2009. Lulus Diploma III Perbankan & Akuntansi dari Politeknik Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.
 - Bergabung dengan Perseroan mulai 15 November 2024 sebagai PE Kredit.
 - Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja pada PT Bank Ganesha, Tbk sebagai Kabag Analyst Credit (2013-2016); PT Bank Harda sebagai Kabag Analyst Credit (2010-2013); PT Bank Barclay Indonesia (dh/ PT Bank Akita) sebagai Account Officer (2007-2010); PT Bank Bisnis International sebagai Account Officer (2001-2007); PT Bank Unibank sebagai Marketing Officer (2000-2001); PT Bank Expor Impor Indonesia sebagai Staff Akuntansi (1993-1998);
- 3) Teza Aditya, PE Audit Intern
 - Lahir di Karawang, 24 Januari 1989.
 - Pendidikan terakhir adalah D3 Akuntansi, Universitas Singaperbangsa, Karawang 2012.
 - Bergabung dengan Perseroan mulai tahun 2019 sebagai staff akuntansi, dan sejak tanggal 15 November 2024 ditetapkan sebagai PE Audit Intern.
 - Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja pada SMK Korpri, Karawang sebagai Staff Tata Usaha/Bendaran (2012-2015); Praktek kerja di PT Bank BJB, KCP Telagasari, Karawang (2012)

2. Kepemilikan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Telagasari Utama No. 50 tanggal 15 November 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah dilaksanakan perubahan kepemilikan saham BPR, sehingga susunan kepemilikan BPR adalah sebagai berikut:

Kepemilikan sebelum akuisisi:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
1. drg. Hengky Ganda Kusuma (PSP)	780.000	780.000.000	60
2. Mangiring Sihol Paria Lumbantoruan	390.000	390.000.000	30
3. Djoko Kusumowidagdo	130.000	130.000.000	10
Total	1.300.000	1.300.000.000	100

Kepemilikan setelah akuisisi:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
1. PT Infiniti Investama Indonesia (PSP)	8.408.700	8.408.700.000	98,93
2. Ir. Hendri Wirja Kusuma	91.300	91.300.000	1,07
Total	8.500.000	8.500.000.000	100.00

Pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate share holders*) BPR adalah Halim Susanto melalui PT Infiniti Investama Indonesia. Susunan pemegang saham BPR, telah ditatausahakan dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai surat Nomor S-99/KO.1212/2024 tertanggal 18 Desember 2024.

3. Perkembangan Usaha BPR

a. Riwayat Pendirian BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Hagati Wiradana Sejahtera (nama Perusahaan sebelumnya adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Telagasari Utama; “BPR HAGATI”) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 17 November 1989, yang dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Karawang. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-849.HT.01.01.Th.90 tanggal 17 Februari 1990 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 3 Maret 1990 dibawah nomor pendaftaran No. 07/N/P.T./90/PN.Krw. (“Akta Pendirian BPR HAGATI”). Akta Pendirian BPR HAGATI tersebut telah mengalami perbaikan berdasarkan Akta Perbaikan No. 9 tanggal 27 Januari 1990, yang dibuat di hadapan Tawangningrum Purwono, S.H., Notaris di Karawang, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-849.HT.01.01.Th.90 tanggal 17 Februari 1990 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 3 Maret 1990 dibawah nomor pendaftaran No. 08/N/P.T./90/PN.Krw (“Akta BPR HAGATI No. 9/1990”).

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar BPR HAGATI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Mitra Telagasari Utama, tanggal 09 Januari 2025, Nomor 20, Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0000838. AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 13 Januari 2025 (“Akta BPR HAGATI No. 09/2025”), Dimana Perseroan berganti nama dari PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Telagasari Utama, menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Hagati Wiradana Sejahtera.

Izin usaha BPR HAGATI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-295/KM.13/1990 tanggal 4 Juni 1990 tentang Pemberian Izin Usaha. Izin usaha ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 1990, dan BPR HAGATI beroperasi mulai tanggal 17 Juli 1990.

Bidang usaha BPR HAGATI sesuai Anggaran Dasar adalah Perbankan (Bank Perkreditan Rakyat), dengan kegiatan usaha utamanya adalah:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka.

tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 2) Memberikan kredit, menempatkan dananya dalam bentuk surat berharga dan penempatan pada bank lain berupa tabungan, giro dan deposito.

Tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha BPR HAGATI adalah di Kabupaten Karawang dengan alamat kantor Pusat di Jl. Raya Telagasari No. 1, DS. Talagasari, Kecamatan Telagasari, Kelurahan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

b. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Secara umum kinerja keuangan pada tahun 2024 tumbuh dengan baik. Pertumbuhan pos-pos penting seperti total aset, kredit yang diberikan dan Simpanan naik dan telah melampaui target rencana bisnis.

Secara umum kinerja keuangan BPR selama tahun 2024 meningkat dengan baik seiring dengan akuisisi yang dilakukan oleh PT Infiniti Investama Indonesia dengan melakukan penambahan modal pada 15 November 2024. Realisasi pos-pos penting seperti total aset, kredit yang diberikan, DPK dan laba-rugi telah melampaui target hingga akhir tahun atau tidak terdapat deviasi negatif terhadap RBB. Dalam hal ini pada akhir tahun 2024, Total aset menjadi sebesar Rp32,712,666,598 (tumbuh 352,98% yoy), Kredit yang diberikan sebesar Rp4,521,944,324 (tumbuh 39,58% yoy), Simpanan nasabah sebesar total Rp19,864,784,288 (tumbuh 996,72% yoy), dan Laba tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp243,238,857 (turun 32,15% yoy).

Jumlah pendapatan operasional sebesar Rp1,331,027,681 turun 5.51% yoy, dan beban operasional sebesar Rp1,057,574,904 naik 5,42% yoy, sehingga menghasilkan laba operasional sebesar Rp273,452,777 atau turun 32,56% yoy. Dalam hal ini tidak terdapat kerugian non operasional, sehingga laba setelah pajak menjadi Rp243,238,857 atau turun 32,15% yoy.

(Dalam Satuan Rupiah)

Pos Neraca	31-Dec-2024	31-Dec-2023	Pertumbuhan
Kas dalam Rupiah	128,267,500	117,074,000	9.56%
Penempatan pada Bank Lain	27,738,288,095	3,669,016,214	656.01%
-/- CKPN ABA	5,000,000	0	0.00%
Kredit yang Diberikan	4,521,944,324	3,239,785,499	39.58%
-/- CKPN Kredit	41,781,576	34,076,496	22.61%
Agunan yang Diambil Alih	49,200,000	0	0.00%
Aset Tetap dan Inventaris	75,265,097	101,740,321	-26.02%
Aset Tidak Berwujud	1	1	0.00%
Aset Lainnya	246,483,157	128,069,266	92.46%
Total Aset	32,712,666,598	7,221,608,805	352.98%
Liabilitas Segera	16,032,549	43,946,296	-63.52%
Simpanan	19,864,784,288	1,811,282,259	996.72%
Liabilitas Lainnya	168,462,934	146,232,280	15.20%
Total Liabilitas	20,049,279,771	2,001,460,835	901.73%
Modal Disetor	8,500,000,000	1,300,000,000	553.85%
Cadangan	200,000,000	200,000,000	0.00%

(Dalam Satuan Rupiah)

Pos Neraca	31-Dec-2024	31-Dec-2023	Pertumbuhan
Laba (Rugi)	3,963,386,827	3,720,147,970	6.54%
a. Tahun-tahun Lalu	3,720,147,970	3,361,648,911	10.66%
b. Tahun Berjalan	243,238,857	358,499,059	-32.15%
Total Ekuitas	12,663,386,827	5,220,147,970	142.59%
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga	1,281,116,416	1,305,914,606	-1.90%
Pendapatan Lainnya	49,911,265	102,778,880	-51.44%
Jumlah Pendapatan Operasional	1,331,027,681	1,408,693,486	-5.51%
Beban Operasional			
Beban Bunga	129,092,778	56,616,417	128.01%
Beban Kerugian Penurunan Nilai	12,705,080	68,378,329	-81.42%
Beban Pemasaran	5,000,000	400,000	1150.00%
Beban Administrasi dan Umum	870,604,291	840,056,806	3.64%
Beban Lainnya	40,172,755	37,755,000	6.40%
Jumlah Beban Operasional	1,057,574,904	1,003,206,552	5.42%
LABA (RUGI) OPERASIONAL	273,452,777	405,486,934	-32.56%
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	0	(2,631,600)	-100.00%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	273,452,777	402,855,334	-32.12%
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	30,213,920	44,356,275	-31.88%
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	243,238,857	358,499,059	-32.15%

c. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

(%)

Rasio	31-Dec-2024	31-Dec-2023	Pertumbuhan
a. KPMM	149.04	123.98	25.06
b. Rasio Cadangan terhadap PPKA	100.00	100.00	-
c. NPL (neto)	0.61	3.35	(2.74)
d. NPL (gross)	1.08	4.39	(3.31)
e. ROA	2.65	6.45	(3.80)
f. BOPO	79.46	68.67	10.79
g. NIM	11.47	18.06	(6.59)
h. LDR	23.04	47.45	(24.41)
i. Cash Ratio	11.90	204.08	(192.18)

Rasio keuangan BPR pada akhir tahun 2024 menunjukkan posisi keuangan yang sehat:

- Kecukupan modal BPR atau KPMM jauh di atas rasio yang dipersyaratkan (minimum 12%) yakni sebesar 149.04% atau naik 25.06% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 123.98%.
- Rasio kredit bermasalah atau NPL menunjukkan penurunan menjadi 0.61% dari tahun sebelumnya 3.35% (netto); 1.08% dari tahun sebelumnya 4.39% (gross). Sementara itu pencadangan penghapusan aset produktif dibentuk dengan memadai sebesar 100% dari yang wajib dibentuk.
- Kemampuan BPR dalam menghasilkan laba masih baik, meski rasio ROA sebesar 2.65% turun 2.93% dari tahun sebelumnya sebesar 5.58%, sementara rasio BOPO juga

meningkat 8.24% menjadi 79.46% dari tahun sebelumnya sebesar 71.22%.

- Likuiditas BPR masih terjaga pada tingkat yang baik, dimana LDR sebesar 23.04% dan cash ratio sebesar 11.90%.

d. Penjelasan Mengenai NPL termasuk Penyebab Utama NPL

(Dalam Satuan Rupiah)

Kredit Bermasalah	31-Dec-2024	31-Dec-2023	Pertumbuhan
Baki Debet	49,495,639	143,783,629	-65.58%
Nominal	49,017,514	143,650,688	-65.88%
jumlah Debitur	7	8	-12.50%
PPKA	21,425,619	34,033,532	-37.05%
Total Baki Debet Kredit	4,576,477,335	3,276,122,310	39.69%
NPL gross	1.08%	4.39%	-3.31%
NPL Net	0.61%	3.35%	-2.74%

- NPL (gross) secara rasio membaik dari 4.39% (baki debet Rp143,783,629; 8 debitur) di akhir 2023 menjadi 1.08% (baki debet Rp49,495,639; 7 debitur) pada akhir tahun 2024. Penyebab utama kredit bermasalah umumnya adalah disebabkan oleh faktor gagal bayarnya debitur yang mengalami kegagalan atau penurunan usaha karena faktor kondisi perekonomian, gagal panen.
- Dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah tersebut, BPR fokus dengan pelaksanaan rencana kerja, antara lain sebagai berikut:
 1. Melakukan langkah pembinaan lebih intensif kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah dan kredit yang berpotensi bermasalah, antara lain melalui monitoring dan kunjungan ke debitur, serta penagihan yang lebih intensif;
 2. Melakukan restrukturisasi kepada Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi; dan Menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah restrukturisasi.
 3. Hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Debitur sudah tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya restrukturisasi tidak berhasil sehingga portofolio kredit BPR tetap Macet; Agunan yang dikuasai BPR tidak mencukupi untuk melunasi kredit.

e. Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap BPR dan Perubahan Penting Lain Pada Periode Laporan

Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR:

- 1) Penambahan modal disetor sebesar Rp7,200,000,000 sehingga total modal disetor menjadi Rp8,500,000,000 (naik 553,85% yoy) dan total ekuitas menjadi Rp12,663,386,827 (naik 142,59% yoy); dan
- 2) Kenaikan deposito menjadi Rp19,105,000,000 (naik 2.244,17% yoy) sehingga total simpanan menjadi Rp19,864,784,288 dan total aset BPR menjadi Rp32,712,666,598 (naik 352,98% yoy).

Perubahan penting lain pada periode laporan:

- 1) Akuisisi BPR oleh PT Infiniti Investama Indonesia (98,93%) sebagai Pemegang Saham Pengendali BPR pada 15 November 2024, dimana Pemegang Saham Pengendali Akhir (*ultimate shareholders*) BPR adalah Halim Susanto melalui PT Infiniti Investama Indonesia; dan

2) Perubahan pengurus BPR sehingga jumlah Direksi BPR menjadi 3 (tiga) orang.

4. Strategi dan Kebijakan Manajemen

a. Visi & Misi BPR

Visi: “Menjadi BPR yang Resilien, Berdaya Saing dan Kontributif”

Visi ini mencerminkan tekad dan komitmen BPR untuk mencapai beberapa hal penting:

- 1) “BPR yang Resilien” adalah BPR yang kuat dan tahan terhadap berbagai tantangan dan tekanan yang mungkin timbul di dunia bisnis dan keuangan. Ini mencakup kemampuan untuk menghadapi krisis ekonomi, perubahan regulasi, perubahan pasar, dan berbagai risiko lainnya dengan kemampuan untuk bertahan dan pulih dengan cepat. Dalam konteks visi ini, secara struktural BPR berusaha untuk membangun fondasi keuangan yang kokoh dan penerapan tata kelola serta manajemen risiko yang efektif.
- 2) “BPR yang Berdaya Saing” menunjukkan bahwa BPR memiliki tujuan untuk menjadi pesaing yang tangguh dalam industri perbankan, khususnya industri BPR. Ini mencakup kemampuan untuk menyediakan produk dan layanan BPR yang berkualitas, inovatif, dan kompetitif. BPR harus mampu dengan cerdas untuk ‘bersaing’ dengan bank-bank lain, khususnya BPR dan lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan kepercayaan dan bisnis dari nasabahnya.
- 3) “BPR yang Kontributif” menunjukkan BPR harus memiliki peran sebagai mitra yang aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di wilayahnya. BPR tidak hanya berfokus pada keuntungan sendiri, tetapi juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada komunitas dan masyarakat sekitarnya. Ini bisa mencakup memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, kredit multiguna, serta mendukung proyek-proyek pembangunan lokal, atau berpartisipasi dalam program-program keberlanjutan.

Misi:

- 1) Menerapkan Tata Kelola, Manajemen Risiko serta Kepatuhan yang Terintegrasi.
- 2) Menyediakan Produk dan Layanan BPR yang Inklusif dan Berdaya Saing.
- 3) Melakukan langkah Transformasi Digital yang Adaptif dan Unggul.
- 4) Mengembangkan Perangkat Pendukung yang Unggul, meliputi: Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan, SDM dan Sinergi & Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan.

b. Arah Kebijakan BPR

Arah kebijakan BPR adalah sebagai berikut:

- 1). Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif BPR, melalui:
 - a) Penguatan permodalan agar lebih resilien dalam mendukung ekspansi usaha menuju skala usaha BPR yang optimal dan efisien.
 - b) Penguatan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC) yang terintegrasi.
 - c) Pengembangan produk & layanan yang inovatif, Inklusif dan berdaya saing.
 - d) Penguatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) BPR yang dapat secara efektif dan efisien dalam menjalankan seluruh kegiatan BPR untuk mencapai tujuan perusahaan.
- 2). Akselerasi Transformasi Digital, melalui:
 - a) Memperkuat GRC Teknologi Informasi (TI).
 - b) Memperkuat Kerjasama terkait TI.
 - c) Mengembangkan penerapan *advanced digital* BPR sebagai langkah Transformasi Digital yang Adaptif dan Unggul.
- 3). Penguatan Peran BPR dalam Perekonomian Nasional, melalui:

- a) Mengoptimalkan peran dalam pembiayaan ekonomi melalui Peningkatan share pembiayaan BPR kepada sektor prioritas, UMKM dan Pembangunan daerah agar menjadi *Local Champion*.
- b) Meningkatkan akses/inklusi dan edukasi/literasi keuangan.
- c) Mendorong partisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan.

c. Strategi Pengembangan Usaha

Selama tahun 2024 BPR telah berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengelola dan mengembangkan usaha BPR, antara sebagai berikut:

- 1) Pembenahan Organisasi dan pengembangan kompetensi SDM agar mampu mengelola proses bisnis internal secara efektif dan efisien selaras dengan tujuan perusahaan.
- 2) Mengembangkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BPR melalui penguatan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang selaras dengan Visi dan Misi perusahaan yang berorientasi kepada pelayanan nasabah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- 3) Meningkatkan kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur di BPR;
- 4) Meningkatkan pendapatan dan utilisasi asset melalui Penanganan kredit bermasalah dan penjualan AYDA.
- 5) Memperbaiki struktur biaya melalui program efisiensi.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kecukupan sistem informasi dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan proses bisnis internal.
- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan aktivitas pemasaran dalam rangka mencapai pertumbuhan asset yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, termasuk melakukan penetrasi di berbagai peluang pasar, perluasan jaringan, dan peningkatan *market share* di pasar yang memberikan margin keuntungan dan peluang pertumbuhan yang tinggi

d. Kebijakan Tata Kelola

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka BPR secara berkelanjutan menerapkan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* merujuk pada *best practise* pada industri BPR dan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah;

Pelaksanaan GCG di BPR secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

- 4) Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- 5) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Manajemen BPR berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut:

- 1) Aspek Pemegang Saham;
- 2) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- 3) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
- 4) Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite;
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan;
- 6) Penerapan Fungsi Kepatuhan;
- 7) Penerapan Fungsi Audit Intern;
- 8) Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
- 9) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
- 10) Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR;
- 11) Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;
- 12) Rencana Bisnis BPR.

e. Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan penerapan fungsi manajemen risiko sejalan dengan kerangka kerja manajemen risiko yang mengacu kepada Visi dan Misi yang ditetapkan BPR dan didukung oleh empat pilar pokok yaitu:

- 1) pilar pertama: pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, yang meliputi struktur organisasi dan sumber daya manusia;
- 2) pilar kedua: kebijakan, prosedur dan limit;
- 3) pilar ketiga: kecukupan proses penerapan dan sistem informasi manajemen; serta
- 4) pilar keempat: sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut maka langkah-langkah atau strategi dalam menerapkan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan, PE Audit Intern, satuan kerja operasional, dan satuan kerja pendukung lainnya terkait penerapan manajemen risiko sesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan BPR, termasuk penetapan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan;
- 2) Penempatan pejabat yang kompeten pada PE Manajemen Risiko sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha BPR;
- 3) Peningkatan kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan satuan kerja operasional dan PE Manajemen Risiko, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman (*track record*), kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko;

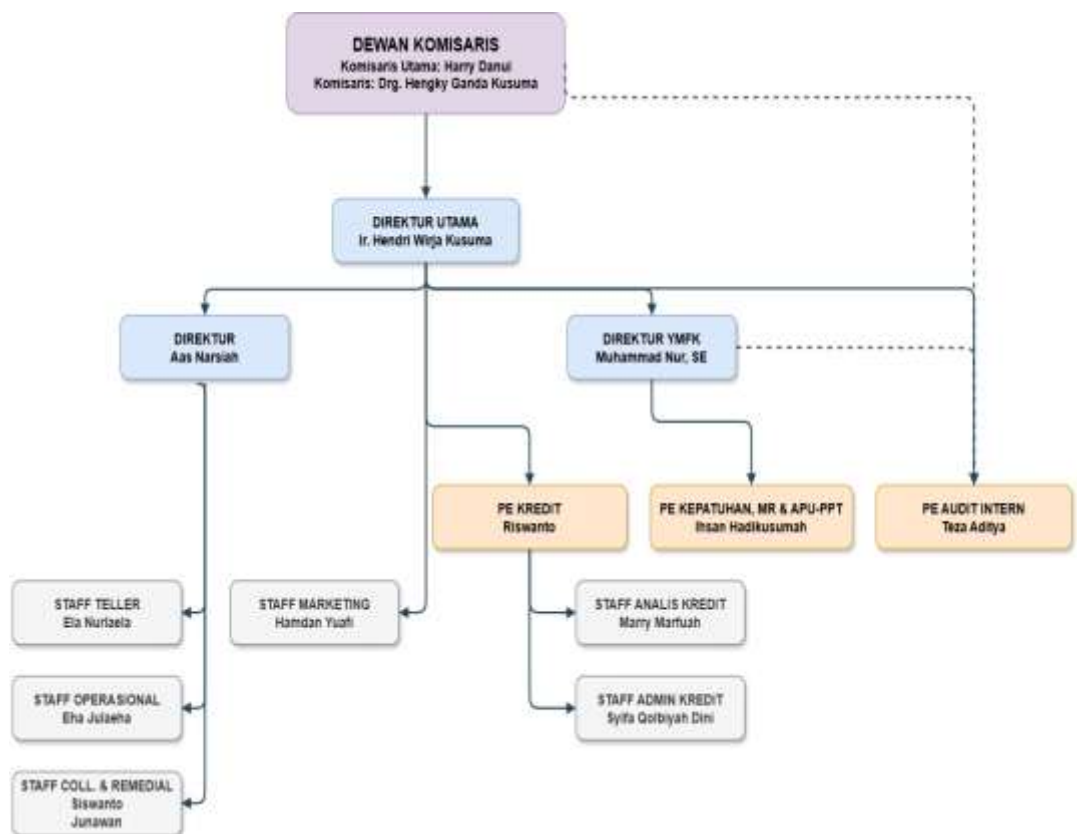
- 4) Pengembangan sistem penerimaan pegawai, pengembangan dan pelatihan pegawai, serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko;
- 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko;
- 6) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip-prinsip Manajemen Risiko termasuk mengembangkan budaya sadar Risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif;
- 7) Menyusun kebijakan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) BPR;
- 8) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan dan strategi manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan;
- 9) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko;
- 10) Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan BPR, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko BPR;
- 11) Penetapan penilaian peringkat profil risiko sebagai dasar bagi BPR untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
- 12) Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- 13) Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha BPR dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana darurat (*contingency plan*). Dalam penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha tersebut akan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a) Melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
 - b) Bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi-kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
 - c) Pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala;
- 14) Memastikan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dalam kerangka kerja penerapan manajemen risiko yang menyeluruh telah dilakukan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR, dimana pelaksanaannya paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR;

- b) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- c) penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- d) struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR, termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;
- e) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- f) kecukupan kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g) dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus BPR berdasarkan hasil audit;
- h) verifikasi dan review yang efektif, independen dan obyektif terhadap terhadap sistem pengendalian intern, antara lain terhadap:
 - (1) penanganan kelemahan-kelemahan BPR yang bersifat material dan tindakan pengurus BPR untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
 - (2) prosedur penilaian kegiatan operasional BPR;
 - (3) sistem informasi manajemen.

5. Laporan Manajemen

a. Struktur Organisasi

BPR terus mengembangkan organisasi secara berkelanjutan untuk menjamin agar berbagai aktivitas dikelola melalui pengaturan seluruh sumber daya dalam cara yang paling efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kompleksitas perusahaan, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.



Secara berkesinambungan, BPR melakukan pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien guna mendukung operasional dan perkembangan bisnis bank secara konsisten.

b. Bidang Usaha

Anggaran Dasar Perseroan menandakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank perkreditan rakyat dengan aktivitas kegiatan utama yakni:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit, menempatkan dananya dalam bentuk surat berharga dan penempatan pada bank lain berupa: giro, Tabungan, deposito.

c. Teknologi Informasi

Untuk menunjang kinerja operasional Perusahaan, maka BPR Hagati bekerjasama dengan PT USSI Pinbuk Prima Software (PT USSI) dalam penyediaan sistem informasi inti perbankan (*core banking system*) yang dapat beroperasi secara *real time online*. PT USSI adalah perusahaan penyedia layanan pendukung bisnis berbasis teknologi informasi (TI) dan komunikasi yang sudah berpengalaman.

Dengan adanya fasilitas *core banking system* ini diharapkan efisiensi dan kinerja BPR HAGATI akan semakin baik. BPR dapat melayani nasabahnya dengan dengan cepat dan akurat. Tentunya diharapkan kepercayaan pada BPR akan semakin meningkat, sehingga BPR dapat mengembangkan produk dana pihak ketiga dalam bentuk deposito dan tabungan.

d. Perkembangan dan Target Pasar

1) Penghimpunan Dana
a) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

(Dalam Satuan Rupiah)

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	2024	2023	Pertumbuhan (%)
TABUNGAN			
Pihak Terkait	32,191,000	332,469,000	-90.32%
Pihak Tidak Terkait	727,593,000	663,813,000	9.61%
TOTAL TABUNGAN	759,784,000	996,282,000	-23.74%
DEPOSITO			0.00%
Pihak Terkait	19,105,000,000	815,000,000	2244.17%
1 Bulan	18,500,000,000	0	0.00%
3 Bulan	0	0	0.00%
6 Bulan	0	0	0.00%
≥ 12 Bulan	605,000,000	815,000,000	-25.77%
Pihak Tidak Terkait	0	0	0.00%
1 Bulan	0	0	0.00%
3 Bulan	0	0	0.00%
6 Bulan	0	0	0.00%
≥ 12 Bulan	0	0	0.00%
TOTAL DEPOSITO	19,105,000,000	815,000,000	2244.17%
TOTAL PENGHIMPUNAN DPK	19,864,784,000	1,811,282,000	996.73%
DANA NASABAH INTI	19,769,263,000	1,704,270,000	1059.98%
Dana Penabung Inti	664,263,000	889,270,000	-25.30%
Dana Deposan Inti	19,105,000,000	815,000,000	2244.17%
% DANA PENABUNG INTI TERHADAP TABUNGAN	87	89	-2.05%
% DANA DEPOSAN INTI TERHADAP DEPOSITO	100	100	0.00%

Sampai Akhir Tahun 2024, total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp19,864,784,288 naik signifikan 996,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disumbang oleh pertumbuhan Deposito menjadi Rp19,105,000,000 dengan kenaikan 2244,17% yoy.

b) Pendanaan Lainnya

Sampai akhir tahun 2024, BPR tidak memiliki saldo penghimpunan pendanaan lainnya.

2) Pelaksanaan Penyaluran Dana

(Dalam Satuan Rupiah)

Jenis Kredit	2024	2023	Pertumbuhan (%)
Kredit Modal Kerja	4,014,766,914	3,126,764,229	28.40%
Kredit Investasi	0	49,926,658	-100.00%
Kredit Konsumsi	507,177,410	63,094,612	703.84%
Total	4,521,944,324	3,239,785,499	39.58%

Dari penghimpunan dana yang dilakukan, BPR menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Posisi kredit diberikan sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp4,521,944,324 atau tumbuh 39,58% dari periode tahun sebelumnya.

e. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Sampai dengan akhir tahun 2024, BPR tidak memiliki jaringan kantor lain selain Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Raya Telagasari No. 1, DS. Talagasari, Kecamatan Telagasari, Kelurahan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

f. Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain Dalam Rangka Pengembangan Usaha

Saat ini BPR belum melakukan kerjasama apa pun dengan Bank atau Lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha.

g. Kepemilikan oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Dalam Kelompok Usaha BPR, dan Perubahan Kepemilikan Dari Tahun Sebelumnya

1) Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi:

Kepemilikan Pada	2024		2023	
	Nominal	%	Nominal	%
a. BPR yang bersangkutan				
1) Ir. Hendri Wirja Kusuma	91.300.000	1,07	Nihil	0%
2) Muhammad Nur, S.E.	Nihil	0%	Nihil	0%
3) Aas Narsiah, S.M.	Nihil	0%	Nihil	0%
b. Kelompok usaha BPR lainnya	Nihil	0%	Nihil	0%

2) Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Pada	2024		2023	
	Nominal	%	Nominal	%
a. BPR yang bersangkutan				
1) Harry Danui	Nihil	0%	Nihil	0%
2) Drg. Hengky Ganda Kusuma	Nihil	0%	780.000.000	60
b. Kelompok usaha BPR lainnya	Nihil	0%	Nihil	0%

3) Kepemilikan Pemegang Saham Dalam Kelompok Usaha BPR

PT Infiniti Investama Indonesia selaku pemegang saham BPR, memiliki kepemilikan saham pada PT Ascend Bangun Persada sebesar 25% pada tahun 2024 dan 2023

4) Perubahan Kepemilikan Dari Tahun Sebelumnya

Selama tahun 2024 terdapat perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BPR No. 50 tanggal 15 November 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah dilaksanakan perubahan kepemilikan saham BPR, sehingga susunan kepemilikan BPR adalah sebagai berikut:

Kepemilikan sebelum akuisisi:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
1. drg. Hengky Ganda Kusuma	780.000	780.000.000	60
2. Mangiring Sihol Paria Lumbantoruan	390.000	390.000.000	30
3. Djoko Kusumowidagdo	130.000	130.000.000	10
Total	1.300.000	1.300.000.000	100

Kepemilikan setelah akuisisi:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
1. PT Infiniti Investama Indonesia	8.408.700	8.408.700.000	98,93
2. Ir. Hendri Wirja Kusuma	91.300	91.300.000	1,07
Total	8.500.000	8.500.000.000	100.00

Susunan pemegang saham BPR, telah ditatausahakan dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai surat Nomor S-99/KO.1212/2024 tertanggal 18 Desember 2024.

h. Keterkaitan antar pemilik, antar pengurus, dan antara pemilik dengan pengurus BPR

- Direktur Utama BPR, Ir. Hendri Wirja Kusuma merupakan pemegang saham BPR dengan kepemilikan 1,07%.
- Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keterkaitan, baik hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.
- Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keterkaitan, baik hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

i. Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Bidang Tugas

No	Satuan Kerja	Jumlah SDM	
		2024	2023
1.	Dewan Komisaris	2	2
2.	Direksi	3	1
3.	PE Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU-PPT	1	-
4.	PE Audit Intern	1	-
5.	PE Kredit	1	-
6.	Teller	1	1
7.	Customer Service	-	1
8.	Operasional	1	1
9.	Marketing	1	1
10.	Admin Kredit	1	1
11.	Analisis Kredit	1	1
12.	Collection & Remedial	2	1
	Total	15	10

2) Komposisi Pegawai

Berdasarkan Gender:

No	Pendidikan	Jumlah SDM	
		2024	2023
1.	Pria	10	5
2.	Wanita	5	5
	Total	15	10

Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah SDM	
		2024	2023
1.	S1	11	6
2.	Diploma	2	2
3.	SMA	2	2
	Total	15	10

3) Kegiatan pengembangan SDM

Kegiatan pengembangan SDM dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan intern (*in-house training*) atau mengirimkan SDM-nya untuk mengikuti pelatihan eksternal untuk meningkatkan kompetensi, antara lain:

(Dalam Ribuan Rp)

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Tanggal Seminar	Penyelenggara	Biaya
1	Penyegaran sertifikasi komisaris a/n Ir. Mangiring Lumban	1	5-7 Feb 2024	BNSP	7,000
2	Sosialisasi TPPU	1	27-Feb-24	OJK, Bandung	250
3	Implementasi SAK-EP USSI	1	22-24 Mar 2024	USSI, Bandung	1,500
4	Implementasi CKPN di PT. USSI	1	17-Apr-24	USSI, Bandung	3,000
5	Implementasi SAK-EP & Penerapan Apl. CKPN	2	22-24 Apr 2024	USSI, Bandung	10,500
6	Survailen sertifikasi Direksi Tk 1	1	15-17 Mei 2024	DPD Perbarindo Jabar	8,200
7	Pelatihan IRA (Individual Risk Assesment) & Implementasi APU PPT	1	21 Mei 2024	Lucas Muliawan	990
8	Bimbingan Teknis Pelaporan OJK	3	4-5 Jun-24	OJK, Bandung	2,500
9	Sosialisasi Implementasi Aplikasi Perhitungan CKPN	1	2-Jul-24	USSI, Bandung	2,500
10	Pelatihan Audit Profesi Aplikasi Atlas	2	22-Sep-24	USSI, Bandung	150
11	Pelatihan SAK EP dan penggunaan tools SAK EP USSI (Dir & Staff)	2	9-10 Des 2024	USSI, Bandung	8,430
13	Sosialisasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1	20-Dec-24	OJK, Bandung	1,291
14	Pelatihan Perkreditan	9	24-Dec-24	Inhouse Training, Karawang	7,500
Total					53,811

j. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lainnya

- Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris (Komite Remunerasi & Nominasi) dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
- Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa:

- 1). Gaji;
 - 2). Tunjangan;
 - 3). Tantiem;
 - 4). Kompensasi berbasis saham;
 - 5). Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan;
- Direksi dan Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima;
 - Dewan Komisaris (Komite Remunerasi & Nominasi) bertanggung jawab dan berwenang terhadap evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi.
- k. Perubahan Penting Lainnya Yang Terjadi di BPR dan/atau Di Kelompok Usaha BPR Yang Mempengaruhi Operasional BPR Dalam Tahun Yang Bersangkutan
- Tidak terdapat perubahan penting lainnya yang terjadi di BPR dan/atau di kelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun 2024.

B. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

1. Laporan Posisi Keuangan

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	31-Dec-2024	31-Dec-2023	Pertumbuhan	%
Kas dalam Rupiah	128,267,500	117,074,000	11,193,500	9.56%
Kas dalam Valuta Asing	0	0	0	0.00%
Surat Berharga	0	0	0	0.00%
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0	0	0.00%
Penempatan pada Bank Lain	27,738,288,095	3,669,016,214	24,069,271,881	656.01%
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	5,000,000	0	5,000,000	0.00%
Jumlah	27,733,288,095	3,669,016,214	24,064,271,881	655.88%
Kredit yang Diberikan			0	0.00%
a. Kepada BPR	0	0	0	0.00%
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0.00%
c. Kepada non bank – pihak terkait	62,430,556	31,362,500	31,068,056	99.06%
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	4,459,513,768	3,208,422,999	1,251,090,769	38.99%
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	41,781,576	34,076,496	7,705,080	22.61%
Penyertaan Modal	0	0	0	0.00%
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0	0	0.00%
Jumlah	4,480,162,748	3,205,709,003	1,274,453,745	39.76%
Agunan yang Diambil Alih	49,200,000	0	49,200,000	0.00%
Properti Terbengkalai	0	0	0	0.00%
Aset Tetap dan Inventaris	75,265,097	101,740,321	(26,475,224)	-26.02%
a. Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00%
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	0	0	0	0.00%
c. Inventaris	381,609,037	376,869,037	4,740,000	1.26%
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	306,343,940	275,128,716	31,215,224	11.35%
Aset Tidak Berwujud	43,450,000	43,450,000	0	0.00%
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	43,449,999	43,449,999	0	0.00%
Aset Lainnya	246,483,157	128,069,266	118,413,891	92.46%
Total Aset	32,712,666,598	7,221,608,805	25,491,057,793	352.98%

(Dalam Satuan Rupiah)

LIABILITAS	Des 2024	Des 2023	Pertumbuhan	%
Liabilitas Segera	16,032,549	43,946,296	(27,913,747)	-63.52%
Simpanan	19,864,784,288	1,811,282,259	18,053,502,029	996.72%
a. Tabungan	759,784,288	996,282,259	(236,497,971)	-23.74%
b. Deposito	19,105,000,000	815,000,000	18,290,000,000	2244.17%
Simpanan dari Bank Lain	0	0	0	0.00%
Pinjaman yang Diterima	0	0	0	0.00%
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0	0	0.00%
Liabilitas Lainnya	168,462,934	146,232,280	22,230,654	15.20%
Total Liabilitas	20,049,279,771	2,001,460,835	18,047,818,936	901.73%

(Dalam Satuan Rupiah)

EKUITAS	Des 2024	Des 2023	Pertumbuhan	%
Modal Disetor	8,500,000,000	1,300,000,000	7,200,000,000	553.85%
a. Modal Dasar	30,000,000,000	2,000,000,000	28,000,000,000	1400.00%

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	31-Dec-2024	31-Dec-2023	Pertumbuhan	%
b. Modal yang Belum Disetor -/-	21,500,000,000	700,000,000	20,800,000,000	2971.43%
Tambahan Modal Disetor			0	0.00%
a. Agio	0	0	0	0.00%
b. Modal Sumbangan	0	0	0	0.00%
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0	0	0.00%
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0	0	0.00%
Ekuitas Lain			0	0.00%
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0	0	0.00%
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00%
c. Lainnya	0	0	0	0.00%
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0	0	0.00%
Cadangan			0	0.00%
a. Umum	200,000,000	200,000,000	0	0.00%
b. Tujuan	0	0	0	0.00%
Laba (Rugi)	3,963,386,827	3,720,147,970	243,238,857	6.54%
a. Tahun-tahun Lalu	3,720,147,970	3,361,648,911	358,499,059	10.66%
b. Tahun Berjalan	243,238,857	358,499,059	(115,260,202)	-32.15%
Total Ekuitas	12,663,386,827	5,220,147,970	7,443,238,857	142.59%

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	31-Dec-2024	31-Dec-2023	Growht	%
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga				
a. Bunga Kontraktual	1,208,995,116	1,222,157,085	(13,161,969)	-1.08%
b. Provisi Kredit	72,121,300	83,757,521	(11,636,221)	-13.89%
c. Biaya Transaksi -/-	0	0	0	0.00%
Jumlah Pendapatan Bunga	1,281,116,416	1,305,914,606	(24,798,190)	-1.90%
Pendapatan Lainnya	49,911,265	102,778,880	(52,867,615)	-51.44%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	1,331,027,681	1,408,693,486	(77,665,805)	-5.51%
Beban Bunga	129,092,778	56,616,417	72,476,361	128.01%
a. Beban Bunga Kontraktual	129,092,778	56,616,417	72,476,361	128.01%
b. Biaya Transaksi	0	0	0	0.00%
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0	0	0.00%
Beban Kerugian Penurunan Nilai	12,705,080	68,378,329	(55,673,249)	-81.42%
Beban Pemasaran	5,000,000	400,000	4,600,000	1150.00%
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0.00%
Beban Administrasi dan Umum	870,604,291	840,056,806	30,547,485	3.64%
Beban Lainnya	40,172,755	37,755,000	2,417,755	6.40%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	1,057,574,904	1,003,206,552	54,368,352	5.42%
LABA (RUGI) OPERASIONAL	273,452,777	405,486,934	(132,034,157)	-32.56%
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
Pendapatan Non Operasional	0	0	0	0.00%
Beban Non Operasional	0	2,631,600	(2,631,600)	-100.00%

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	31-Dec-2024	31-Dec-2023	Growht	%
Kerugian Penjualan/Kehilangan	0	0	0	0.00%
Lainnya	0	2,631,600	(2,631,600)	-100.00%
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	0	(2,631,600)	2,631,600	-100.00%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	273,452,777	402,855,334	(129,402,557)	-32.12%
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	30,213,920	44,356,275	(14,142,355)	-31.88%
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN	0	0	0	0.00%
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	243,238,857	358,499,059	(115,260,202)	-32.15%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0		
b. Lainnya	0	0		
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0		
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi				
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0		
b. Lainnya	0	0		
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0		
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	243,238,857	358,499,059	(115,260,202)	-32.15%

3. Laporan Perubahan Ekuitas

(Dalam Satuan Rupiah)

	Modal Saham	Saldo Laba (Ditentukan Penggunaannya)	Saldo Laba (Belum Ditentukan Penggunaannya)	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022	1,300,000,000	200,000,000	3,361,648,911	4,861,648,911
Laba Bersih tahun 2023	-	-	358,499,059	358,499,059
Saldo per 31 Desember 2023	1,300,000,000	200,000,000	3,720,147,970	5,220,147,970
Setoran Modal	7,200,000,000			7,200,000,000
Dividen				0
Laba Bersih tahun berjalan	0	0	243,238,857	243,238,857
Saldo per 31 Desember 2024	8,500,000,000	200,000,000	3,963,386,827	12,663,386,827

4. Laporan Arus Kas

(Dalam Satuan Rupiah)

ARUS KAS	31-Dec-2024	31-Dec-2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	1,208,995,116	1,222,157,085
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	72,121,300	83,757,521
Penerimaan beban klaim asuransi		
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan		
Pendapatan operasional lainnya	49,911,265	102,778,880
Pembayaran beban bunga	(129,092,778)	(56,616,417)
Beban gaji dan tunjangan	(686,732,146)	(637,966,207)
Beban umum dan administrasi	(183,872,145)	(202,090,599)

(Dalam Satuan Rupiah)

ARUS KAS	31-Dec-2024	31-Dec-2023
Beban operasional lainnya	(57,877,835)	(106,533,329)
Pendapatan non operasional lainnya	0	0
Beban non operasional lainnya	0	(2,631,600)
Pembayaran pajak penghasilan	(30,213,920)	(44,356,275)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban		
Penurunan (Peningkatan) atas aset operasional	(25,475,124,293)	(412,853,797)
Penempatan pada bank lain	(24,069,271,881)	(272,701,155)
Kredit yang diberikan	(1,282,158,825)	(137,880,548)
Agunan yang diambil alih	(49,200,000)	0
Aset lain-lain	(118,413,891)	(16,093,061)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	43,920,304	13,820,967
Kenaikan (Penurunan) atas liabilitas operasional	18,047,818,936	99,531,738
Liabilitas segera	(27,913,747)	8,118,722
Tabungan	(236,497,971)	310,512,194
Deposito	18,290,000,000	(150,000,000)
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	(10,820,000)	(75,850,000)
Liabilitas lain-lain	33,050,654	6,750,822
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	(7,184,066,500)	45,177,000
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(4,740,000)	(11,750,000)
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	(4,740,000)	(11,750,000)
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	7,200,000,000	0
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	7,200,000,000	0
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	11,193,500	33,427,000
Kas dan setara Kas awal periode	117,074,000	83,647,000
Kas dan setara Kas akhir periode	128,267,500	117,074,000

5. Catatan Atas Laporan Keuangan, Termasuk Informasi Tentang Komitmen Dan Kontinjensi

Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi disajikan pada lampiran laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ini.

Berikut ini adalah laporan komitmen dan kontinjensi:

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	31-Dec-2024	31-Dec-2023
TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	31-Dec-2024	31-Dec-2023
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
b. Penerusan kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	181,996,336	274,691,336
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	83,282,000	166,977,000
b. Aset produktif yang dihapus buku	98,714,336	107,714,336
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	0	0

C. OPINI AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT

Akuntan Publik Toni Darmawan, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA (AP.1365 dari KAP Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan), menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahunan terlampir menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Pernyataan akuntan publik ini secara lengkap tersaji pada lampiran laporan keuangan tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ini. Adapun Surat komentar atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPR disajikan sebagaimana dimaksud pada **lampiran 1** Laporan Tahunan ini.

D. SELURUH ASPEK TRANSPARANSI DAN INFORMASI YANG DIWAJIBKAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

(Dalam Satuan Rupiah)

Pos	31-Dec-2024					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO						
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0
Penempatan pada bank lain	27,738,288,095		0		0	27,738,288,095
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	63,347,220	0	0	0	0	63,347,220
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	3,914,135,160	549,499,316	28,700,000	0	20,795,639	4,513,130,115
Penyertaan Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	31,715,770,475	549,499,316	28,700,000	0	20,795,639	32,314,765,430
Rasio – rasio (%)						
a. KPMM						149.04
b. Rasio Cadangan terhadap PPKA						100.00
c. NPL (neto)						0.61
d. NPL (gross)						1.08
e. ROA						2.65

(Dalam Satuan Rupiah)

Pos	31-Dec-2024					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
f. BOPO						79.46
g. NIM						11.47
h. LDR						23.04
i. Cash Ratio						11.90

E. SELURUH ASPEK PENGUNGKAPAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN DALAM STANDAR AKUNTASI KEUANGAN YANG BERLAKU BAGI BPR DAN PANDUAN AKUNTANSI BPR

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan

Ikhtisar kebijakan akuntansi disajikan sebagaimana terlampir dalam Laporan Keuangan Tahunan BPR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini, meliputi:

- pernyataan bahwa BPR menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR;
- dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;
- kebijakan akuntansi BPR yang antara lain meliputi kebijakan konsep dasar pengukuran, kredit yang diberikan, penyisihan kerugian kredit, investasi di Sertifikat Bank Indonesia, agunan yang diambil alih, kas dan setara kas, aset tetap dan inventaris serta penyusutan, pengakuan pendapatan bunga, pengakuan beban bunga, pajak penghasilan, dan imbalan kerja.

Adapun penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disajikan sebagaimana terlampir dalam Laporan Keuangan Tahunan BPR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

2. Komitmen dan Kontinjensi

Pengungkapan komitmen dan kontinjensi secara umum disajikan pada huruf B.5. Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk Informasi Mengenai Komitmen dan Kontinjensi.

- Pengungkapan Komitmen**
BPR tidak memiliki perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang, dan tidak memiliki komitmen kepada pihak lain dan pihak yang terkait.
- Pengungkapan Kontinjensi**
Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2024, BPR tidak memiliki perkara atau sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada masa yang akan datang;

3. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang Berlaku bagi BPR dan PA BPR serta Peraturan Lainnya

Perkembangan terakhir SAK yang berlaku, meliputi penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas BPR serta estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan baru tersebut, disajikan sebagaimana terlampir dalam Laporan Keuangan Tahunan BPR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

4. Informasi Penting Lain

Informasi penting lain, antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BPR, disajikan sebagaimana terlampir dalam Laporan Keuangan Tahunan BPR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent event*), meliputi urutan peristiwa serta jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan disajikan sebagaimana terlampir dalam Laporan Keuangan Tahunan BPR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

F. PENGENDALIAN INTERNAL

Merujuk POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Direksi BPR menilai bahwa efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera telah dilaksanakan secara memadai dan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa pelaksanaan pengendalian internal tersebut dilakukan dengan tujuan:

- 1) memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
- 2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan;
- 3) memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan
- 4) memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.
- 5) Sebagai pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun Surat Pernyataan Direksi mengenai kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR, dan tanggung jawab penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR, termasuk hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR disampaikan pada **lampiran 2** Laporan Tahunan ini.

G. LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola disajikan sebagaimana dimaksud pada **lampiran 3** Laporan Tahunan ini.

H. LAPORAN TRANSPARANSI PENANGANAN PENGADUAN YANG DITERIMA OLEH BPR

Pos	2024	2023
Jumlah Pengaduan Yang Diterima	Nihil	Nihil
Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan	Nihil	Nihil
Persentase Penyelesaian	Nihil	Nihil

LAMPIRAN 1.

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN LENGKAP (*AUDITED*)

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
HAGATI WIRADANA SEJAHTERA**

LAPORAN KEUANGAN

tanggal 31 Desember 2024

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
LAPORAN KEUANGAN
tanggal 31 Desember 2024
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 24

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama | : Ir. Hendri Wirja Kusuma |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Taman Modern Blok F2 No. 011, RT 15 RW 006 Ujung Menteng, Cakung Jakarta Timur |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Muhammad Nur, SE |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Perumahan Taman Wisma Asri, Blok T27, Jl. Cempaka VI No.147, RT.003/RW.030 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi 17121 |
| Jabatan | : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) |
| 3. Nama | : Aas Narsiah |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Dusun Pasirkonci 01 RT. 003 RW 001, Lemahmakmur, Tempuran, Kab. Karawang, Jawa Barat |
| Jabatan | : Direktur Operasional |
| Alamat Kantor | : Jl. Raya Talagasari No. 1 RT. 005 RW 001, Talagasari, Telagasari, Kab. Karawang, Jawa Barat |

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera.
2. Laporan keuangan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).
3. a. Semua informasi Laporan Keuangan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera telah dimuat secara lengkap dan
b. Laporan keuangan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karawang, 25 April 2025


Ir. Hendri Wirja Kusuma
Direktur Utama


Muhammad Nur, SE
Direktur YMFK


Aas Narsiah
Direktur Operasional



Kantor Akuntan Publik

IRFAN, ABDULRAHMAN HASAN SALIPU & DARMAWAN

Registered Public Accountants

Jl. Surilang No. 06 A RT.03/01, Gedong, Pasar Rebo – Jakarta Timur 13760 || Telp/Fax.: (021) 2298 4018, (021) 800 4845
e-mail : kap.irfanahsdarmawan@gmail.com-irfanahsdarmawan@kapiad.co.id || website: www.kapiad.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00117/2.1181/AU.2/07/1365-1/1/IV/2025

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Hagati Wiradana Sejahtera ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi yang material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal Lain

Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut, tidak diaudit oleh auditor independen lain.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Kantor Akuntan Publik

IRFAN, ABDULRAHMAN HASAN SALIPU & DARMAWAN

Registered Public Accountants

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



Kantor Akuntan Publik

IRFAN, ABDULRAHMAN HASAN SALIPU & DARMAWAN

Registered Public Accountants

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik

Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan

Toni Darmawan, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1365

Izin Usaha KAP No. 45/KM.1/2018



Jakarta, 25 April 2025

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
NERACA

31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023 (tidak diaudit)
ASET			
Kas	2b, 4	128.267.500	117.074.000
Pendapatan bunga yang akan diterima	2c, 5	117.863.157	93.214.268
Penempatan pada bank lain	2d, 6	27.738.288.095	3.669.016.214
Penyisihan kerugian	2f, 6	(5.000.000)	-
		<u>27.733.288.095</u>	<u>3.669.016.214</u>
Kredit yang diberikan	2e, 7	4.521.944.324	3.239.785.499
Penyisihan penilaian kualitas aset	2f, 7	(41.781.576)	(34.076.496)
		<u>4.480.162.748</u>	<u>3.205.709.003</u>
Agunan yang diambil alih	2g, 8	49.200.000	-
Aset tetap	2h, 9	381.609.037	376.869.037
Akumulasi penyusutan	2h, 9	(306.343.940)	(275.128.716)
		<u>75.265.097</u>	<u>101.740.321</u>
Aset tidak berwujud	2i, 10	43.450.000	43.450.000
Amortisasi	2i, 10	(43.449.999)	(43.449.999)
		<u>1</u>	<u>1</u>
Aset lain-lain	2j, 11	128.620.000	34.854.998
JUMLAH ASET		<u>32.712.666.598</u>	<u>7.221.608.805</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	2k, 12	16.032.549	43.946.296
Utang bunga	2l, 13	46.898.630	1.368.280
Utang Pajak	2m, 14a	24.837.804	-
Simpanan	2n, 15	19.864.784.288	1.811.282.259
Kewajiban lain-lain	16	96.726.500	134.044.000
Kewajiban imbalan kerja	2v, 17	-	10.820.000
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>20.049.279.771</u>	<u>2.001.460.835</u>
EKUITAS			
Modal saham	18	8.500.000.000	1.300.000.000
Cadangan umum		200.000.000	200.000.000
Saldo laba		3.963.386.827	3.720.147.970
JUMLAH EKUITAS		<u>12.663.386.827</u>	<u>5.220.147.970</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>32.712.666.598</u>	<u>7.221.608.805</u>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023 (tidak diaudit)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan bunga	2q, 19	1.208.995.116	1.222.157.085
Provisi dan komisi	2r, 19	72.121.300	83.757.521
		1.281.116.416	1.305.914.606
Beban bunga	2q, 20	(129.092.778)	(56.616.417)
Pendapatan Bunga Bersih		1.152.023.638	1.249.298.189
Pendapatan Operasional Lainnya			
Pendapatan operasional lainnya	2s, 21	49.911.265	102.778.880
Jumlah Pendapatan Operasional		1.201.934.903	1.352.077.069
Beban Operasional			
Beban penyisihan penilaian kualitas aset	22	(12.705.080)	(68.378.329)
Beban pemasaran	23	(5.000.000)	(400.000)
Beban administrasi dan umum	24	(870.604.291)	(840.056.806)
Beban operasional lainnya	25	(40.172.755)	(37.755.000)
Jumlah Beban Operasional		(928.482.126)	(946.590.135)
Laba Operasional		273.452.777	405.486.934
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Beban non operasional	2s, 26	-	(2.631.600)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		-	(2.631.600)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		273.452.777	402.855.334
Beban Pajak Penghasilan	2m, 14b	(30.213.920)	(44.356.275)
Laba Bersih		243.238.857	358.499.059

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Cadangan Umum	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2022 (tidak diaudit)	1.300.000.000	200.000.000	3.361.648.911	4.861.648.911
Laba tahun berjalan	-	-	358.499.059	358.499.059
Saldo 31 Desember 2023 (tidak diaudit)	1.300.000.000	200.000.000	3.720.147.970	5.220.147.970
Laba tahun berjalan	-	-	243.238.857	243.238.857
Modal disetor	7.200.000.000	-	-	7.200.000.000
Saldo 31 Desember 2024	8.500.000.000	200.000.000	3.963.386.827	12.663.386.827

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023 (tidak diaudit)
Laba Bersih	243.238.857	358.499.059
Penyesuaian Arus Kas Dari Aktivitas Operasi:		
Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	5.000.000	(6.981.575)
Penyisihan penilaian kualitas aset	7.705.080	(8.769.534)
Penyusutan aset tetap dan inventaris	31.215.224	29.572.076
Perubahan Aset Dan Kewajiban Dari Aktivitas Operasi:		
Pendapatan bunga yang akan diterima	(24.648.889)	(12.853.062)
Penempatan pada bank lain	(24.069.271.881)	(272.701.154)
Kredit yang diberikan	(1.282.158.825)	(137.880.548)
Agunan yang diambil alih	(49.200.000)	-
Aset lain-lain	(93.765.002)	(3.239.999)
Kewajiban segera	(27.913.747)	8.118.722
Utang bunga	45.530.350	(584.678)
Utang pajak	24.837.804	-
Simpanan	18.053.502.029	160.512.194
Kewajiban imbalan kerja	(10.820.000)	(75.850.000)
Kewajiban lain-lain	(37.317.500)	7.335.500
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Operasi	(7.184.066.500)	45.177.000
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Aset tetap	(4.740.000)	(11.750.000)
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Investasi	(4.740.000)	(11.750.000)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Modal Disetor	7.200.000.000	-
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pendanaan	7.200.000.000	-
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS	11.193.500	33.427.000
SALDO KAS AWAL TAHUN	117.074.000	83.647.000
SALDO KAS AKHIR TAHUN	128.267.500	117.074.000
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN		
Kas dan Setara Kas Terdiri Dari:		
Kas	128.267.500	117.074.000
Penempatan pada bank lain - Giro	1.205.296.213	-
Penempatan pada bank lain - Tabungan	1.032.991.882	1.669.016.214
Penempatan pada bank lain - Deposito	25.500.000.000	2.000.000.000
Jumlah	27.866.555.595	3.786.090.214

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Bank Perekonomian Rakyat Hagati Wiradana Sejahtera (dah/ PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Telagasari Utama; BPR) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.25 tanggal 17 November 1989 oleh Notaris Erly Soehandjojo, S.H Notaris di Karawang. Akta ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Karawang No. 07/N.P.T/90/PN.Krw tanggal 3 Maret 1990.

Akta ini mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Akta perubahan anggaran dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Telagasari Utama berdasarkan Akta No.50 tanggal 15 November 2024 oleh Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Akta ini juga merupakan akta perubahan pemegang saham perseroan. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0074659.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 20 November 2025 dan akta perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0212278 tanggal 20 November 2024.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat (KBLI 64131) yaitu mencakup dalam hal menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit dan menempatkan dananya dalam bentuk Surat Berharga, Deposito Berjangka dan/atau tabungan pada bank lain.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perusahaan telah memiliki izin-izin sebagai berikut :

- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2911210042561
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 0015-1282-1843-3000

d. Sumber daya manusia

Jumlah pegawai PT. BPR Hagati Wiradana Sejahtera per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk 2 (dua) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Direksi.

c. Susunan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 15 November 2024 dari Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, susunan pengurus PT. BPR Hagati Wiradana Sejahtera per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Harry Danui
Komisaris	: Drg. Hengki Ganda Kusuma

Direksi

Direktur Utama	: Ir. Hendri Wirja Kusuma
Direktur Operasional	: Aas Narsiah
Direktur Kepatuhan	: Muhammad Nur, S.E.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan akuntansi PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera yang diterapkan antara lain sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan Pedoman Akuntansi BPR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun 2010.

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dan berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada bank lain dan fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima dinyatakan sebesar bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing loan*, termasuk kualitas dalam perhatian khusus) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dan surat berharga.

d. Penempatan pada bank lain

Giro dan Tabungan

Dana pada bank lain yang sifatnya sangat likuid berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan bertujuan untuk menunjang aktivitas operasional.

Deposito Berjangka

Penempatan dana bank pada bank lain, dalam bentuk deposito berjangka dan lain-lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

e. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan disajikan sebesar pokok kredit/baki debit. Provisi dan biaya transaksi ditanggung oleh nasabah yang bersangkutan.

Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai penghasilan bunga yang ditangguhkan.

Kredit diklasifikasikan sebagai *non-performing* pada saat pokok pinjaman telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok kredit atau bunga kredit tersebut mulai kurang lancar. Penghasilan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai *non-performing* tidak diperhitungkan dalam laporan laba rugi, namun dicatat sebagai tagihan kontijensi (rekening administratif), dan akan diakui sebagai penghasilan pada saat diterima.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikasi ataupun penerusan kredit diakui sebagai porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Agunan digunakan untuk memitigasi risiko kredit dan kebijakan mitigasi menentukan jenis agunan yang dapat diterima oleh BPR. Umumnya jenis agunan yang diterima BPR untuk memitigasi risiko kredit diantaranya adalah deposito berjangka, tanah dan bangunan, dan kendaraan bermotor.

Umumnya agunan yang diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit (*secondary source of credit repayment*) dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Kredit dihapuskan jika tidak ada peluang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh BPR.

Kriteria penghapusbukuan kredit kepada debitur adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria yang memiliki kualitas macet;
- b. Fasilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset sebesar 100% dari pokok kredit;
- c. Hapus buku dilakukan terhadap seluruh kewajiban kreditnya, sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial write-off*);
- d. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil;
- e. Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar.

f. Penyisihan penilaian kualitas aset

Aset produktif terdiri dari penempatan pada bank lain selain giro, surat berharga, kredit yang diberikan dan penyertaan termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

Bank membentuk penyisihan penilaian kualitas aset berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing aset produktif sesuai dengan POJK No. 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.

Penempatan Pada Bank Lain

Bagian penempatan pada bank lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA umum dan khusus.

Presentase penyisihan penilaian ditetapkan sebesar:

PPKA Umum

Lancar	: 0,50%
--------	---------

PPKA Khusus

Kurang Lancar	: 10,00%
Macet	: 100,00%

Kredit Yang Diberikan

PPKA umum dan PPKA khusus untuk kredit yang diberikan dengan penjelasan sebagai berikut:

PPKA Umum

Lancar	: 0,50%
--------	---------

PPKA Khusus

Dalam Perhatian Khusus	: 3,00%
Kurang Lancar	: 10,00%
Diragukan	: 50,00%
Macet	: 100,00%

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Penyisihan penilaian kualitas aset (lanjutan)

Persentase tersebut dikalikan dengan baki debit setelah dikurangi nilai agunan:

- 100% dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan, dan logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai;
- 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 70% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 60% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang.
- 50% dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 50% untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perekonomian rakyat;
- 30% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

g. Agunan yang diambil alih

Agunan (jaminan) yang diambil alih merupakan agunan kredit yang diberikan yang telah diambil alih oleh BPR dan telah diikat secara notariil.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit diakui sebagai aset sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan kredit setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan jika dijual. Apabila terdapat penurunan nilai permanen dari agunan kredit yang diambil alih, maka nilai agunan kredit wajib disesuaikan.

Dalam hal taksiran nilai agunan lebih rendah dari nilai kredit, maka selisih lebih dari saldo pinjaman yang tidak dapat ditagih lagi dibebankan sebagai kerugian tahun berjalan.

Apabila agunan yang diambil alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengambil-alihan agunan tersebut dibebankan ke rekening nasabah.

Laba atau rugi akibat realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Seluruh aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut:

	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Tarif</u>
Inventaris	4 tahun	25%
Kendaraan	8 tahun	12,50%
Bangunan	20 tahun	5%

Tanah dinyatakan berdasarkan beban perolehan dan tidak disusutkan.

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

i. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang dibeli Bank.

Perangkat lunak yang dibeli oleh BPR dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan di masa mendatang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat dari perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai.

j. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari aset yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan masa manfaat (jangka waktu) telah diperjanjikan sejak awal. Biaya dibayar dimuka diamortisasi secara sistematis berdasarkan jangka waktu perjanjian.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Kewajiban Segera

Kewajiban yang telah jatuh tempo dan/atau segera dapat ditagih dan harus segera dibayar. Transaksi kewajiban segera diakui pada saat:

1. Kewajiban telah jatuh tempo; atau
2. Kewajiban menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak.

l. Utang Bunga

Kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

m. Perpajakan

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. BPR harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. BPR tidak mengakui pajak tangguhan.

n. Simpanan dari Nasabah

Simpanan adalah dana dalam bentuk tabungan dan deposito yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Tabungan

- Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung.
- Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
- Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
- Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.

Deposito Berjangka

- Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal atau sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.
- Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
- Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
- Kewajiban bunga bank deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

o. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

Tabungan

- Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain.
- Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
- Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
- Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.

Deposito Berjangka

- Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal atau sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.
- Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
- Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
- Kewajiban bunga bank deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Pinjaman Diterima

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank lain dan/atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual (*accrual basis*).

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Seluruh penerimaan kas atas kredit yang diklasifikasikan sebagai *non-performing*, diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan kas diatas pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pengakuan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan pada saat kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai. Pendapatan bunga dari kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai dilaporkan sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima (*cash basis*).

Beban diakui pada saat terjadinya.

r. Provisi dan Komisi

Provisi dan komisi yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan diakui sebagai pendapatan (beban) provisi dan komisi secara proporsional atau ditangguhkan, serta diamortisasi selama jangka waktu kreditnya.

Pendapatan dan beban provisi atau komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengkreditan dan jangka waktu tertentu ataupun tidak material menurut Bank diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

s. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Seluruh pendapatan dan beban operasional lainnya dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

t. Komitmen dan Kontijensi

Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Kontijensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat diinformasikan setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan.

Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi dibentuk sebesar taksiran kerugiannya serta diakui sebagai beban dan kewajiban secara terpisah.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Transaksi-transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

BPR mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*);
 - b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venture*;
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv);
Pihak tersebut adalah entitas dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
- vi. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

BPR menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

BPR mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total.

v. Program imbalan kerja

BPR mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK-ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut BPR diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

BPR harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Undang - Undang Cipta Kerja) (sebelum 1 Januari 2021: Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU Ketenagakerjaan) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mana yang lebih tinggi.

BPR mampu untuk menggunakan metode *projected unit credit* untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban terkait. Sehingga Perseroan dalam menghitung kewajiban tersebut menggunakan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan dalam menentukan kewajiban imbalan pascakerja, biaya jasa kini, bunga atas kewajiban imbalan, dan keuntungan atau kerugian aktuarial. Tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga pasar obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui dalam laporan laba rugi. BPR tidak menyelenggarakan aset program imbalan pasti.

w. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan BPR pada tanggal neraca (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Kejadian-kejadian setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BPR yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi instrumen keuangan

BPR menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi BPR.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional BPR adalah mata uang dan lingkungan ekonomi primer dimana BPR beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen BPR, mata uang fungsional Bank adalah Rupiah.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali BPR. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

BPR mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi.

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Jika nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diperoleh dari pasar aktif, nilai wajar ditentukan dari beberapa teknik penilaian termasuk model matematika yang menggunakan estimasi dan asumsi, seperti teknik penilaian analisa arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit

BPR melakukan penelaahan atas kredit pada setiap tanggal pelaporan untuk melakukan penilaian atas cadangan penurunan nilai yang telah dicatat (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif atau PPAP). Pertimbangan manajemen diperlukan untuk melakukan estimasi atas jumlah dan waktu arus kas dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai. Nilai tercatat dari kredit BPR setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.480.162.748 dan Rp3.205.709.002.

Liabilitas imbalan pasca kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja ditentukan berdasarkan perhitungan pihak BPR. Perhitungan ini menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian Investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri (turn-over), data historis yang ada di unit Sumber Daya Manusia dan lain-lain. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan pasca kerja BPR yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar nihil dan Rp 10.820.000.

Penyusutan aset tetap

Nilai perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap antara 4 sampai 16 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana BPR menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas penyusutan aset tetap BPR pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 75.265.097 dan Rp 101.740.321.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. BPR mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

4. KAS

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023 (tidak diaudit)
Kas	128.267.500	117.074.000
Jumlah Kas	128.267.500	117.074.000

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023 (tidak diaudit)
Penempatan pada bank lain	44.517.592	-
Kredit yang diberikan	73.345.565	93.214.268
Jumlah Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	117.863.157	93.214.268

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis dan pihak :

Giro

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

	2024	2023 (tidak diaudit)
	1.204.296.213	-
	1.000.000	-
	1.205.296.213	-

Tabungan

Bank Negara Indonesia Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

	2024	2023 (tidak diaudit)
	195.384.160	-
	837.607.722	1.669.016.214
	1.032.991.882	1.669.016.214

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

	2024	2023 (tidak diaudit)
Deposito		
PT Bank Artha Graha Tbk	3.000.000.000	-
PT Bank J-Trust Indonesia	2.000.000.000	-
PT Bank CTBC	2.000.000.000	-
PT BPR Cahaya Arthasejati	2.000.000.000	-
PT BPR Luna Sinar Indonesia	2.000.000.000	-
PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa	2.000.000.000	-
PT BPR Artharindo	2.000.000.000	-
PT BPR DP Taspen	2.000.000.000	-
PT BPR Varia Central Artha	1.000.000.000	-
PT BPR Depo Mitra Mandiri	1.000.000.000	-
PT BPR Rama Ganda	1.000.000.000	-
PT BPR Rasyid	1.000.000.000	-
PT Bank Jabar Banten	500.000.000	2.000.000.000
PT BPR Kranji Krida Sejahtera	500.000.000	-
PT BPR Menaramas Mitra	500.000.000	-
PT BPR Mitra Sejahtera Lestari	500.000.000	-
PT BPR Dian Faraqo	500.000.000	-
PT BPR Naribi Perkasa	500.000.000	-
PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari	500.000.000	-
PT BPR Multi Sembada Dana	500.000.000	-
PT BPR Artatama Sejahtera	500.000.000	-
	25.500.000.000	2.000.000.000
Jumlah penempatan pada bank lain	27.738.288.095	3.669.016.214
Penyisihan Kerugian	(5.000.000)	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain (Bersih)	27.733.288.095	3.669.016.214

b. Berdasarkan kolektibilitas :

Seluruh penempatan pada Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 digolongkan sebagai lancar.

c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut :

	2024	2023 (tidak diaudit)
Saldo Awal	-	-
Pembentukan tahun berjalan	(5.000.000)	-
Penghapusan tahun berjalan	-	-
Saldo Akhir	(5.000.000)	-

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan Jenis Penggunaannya

	2024	2023 (tidak diaudit)
Kredit umum	4.576.477.335	3.276.122.310
	4.576.477.335	3.276.122.310
Provisi dan administrasi	(54.533.011)	(36.336.811)
Jumlah	4.521.944.324	3.239.785.499
Penyisihan penilaian kualitas aset	(41.781.576)	(34.076.496)
	4.480.162.748	3.205.709.003

b. Berdasarkan Kolektibilitas

	2024	2023 (tidak diaudit)
Lancar	3.977.482.380	2.870.788.686
Dalam perhatian khusus	549.499.316	261.549.995
Kurang lancar	28.700.000	23.693.160
Diragukan	-	-
Macet	20.795.639	120.090.469
	4.576.477.335	3.276.122.310
Provisi dan administrasi	(54.533.011)	(36.336.811)
	4.521.944.324	3.239.785.499
Penyisihan penilaian kualitas aset	(41.781.576)	(34.076.496)
Jumlah - Bersih	4.480.162.748	3.205.709.003

c. Berdasarkan Pihak Keterkaitan

	2024	2023 (tidak diaudit)
Pihak terkait	63.347.220	31.875.000
Pihak tidak terkait	4.513.130.115	3.244.247.310
	4.576.477.335	3.276.122.310
Provisi dan administrasi	(54.533.011)	(36.336.811)
	4.521.944.324	3.239.785.499
Penyisihan penilaian kualitas aset	(41.781.576)	(34.076.496)
Jumlah - Bersih	4.480.162.748	3.205.709.003

d. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

	2024	2023 (tidak diaudit)
Saldo awal	(34.076.496)	(42.846.030)
Pembentukan tahun berjalan	(7.705.080)	(68.378.329)
Hapus buku tahun berjalan	-	75.500.000
Koreksi tahun berjalan	-	1.647.863
Saldo Akhir	(41.781.576)	(34.076.496)

8. AGUNAN DIAMBIL ALIH

Agun ini merupakan agunan yang diambil alih per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp49.200.000 dan nihil.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

Akun ini merupakan nilai buku bersih aset tetap per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan mutasi sebagai berikut :

2024					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Koreksi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Kendaraan	230.375.000	-	-	-	230.375.000
Inventaris kantor	146.494.037	4.740.000	-	-	151.234.037
	<u>376.869.037</u>	<u>4.740.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>381.609.037</u>
Akumulasi Penyusutan					
Kendaraan	143.618.747	24.787.500	-	-	168.406.247
Inventaris kantor	131.509.969	6.427.724	-	-	137.937.693
	<u>275.128.716</u>	<u>31.215.224</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>306.343.940</u>
Nilai Buku	<u>101.740.321</u>				<u>75.265.097</u>
2023 (tidak diaudit)					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Koreksi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Kendaraan	230.375.000	-	-	-	230.375.000
Inventaris kantor	134.744.037	11.750.000	-	-	146.494.037
	<u>365.119.037</u>	<u>11.750.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>376.869.037</u>
Akumulasi Penyusutan					
Kendaraan	118.831.247	24.787.500	-	-	143.618.747
Inventaris kantor	126.725.393	4.784.576	-	-	131.509.969
	<u>245.556.640</u>	<u>29.572.076</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>275.128.716</u>
Nilai Buku	<u>119.562.397</u>				<u>101.740.321</u>

10. ASET TIDAK BERWUJUD

Akun ini merupakan nilai buku bersih aset tidak berwujud per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023 (tidak diaudit)
Aset tidak berwujud	43.450.000	43.450.000
Amortisasi	(43.449.999)	(43.449.999)
Nilai Buku	<u>1</u>	<u>1</u>

11. ASET LAIN-LAIN

Aset ini terdiri dari :

	2024	2023 (tidak diaudit)
Uang muka sewa kantor	115.500.000	30.000.000
Persediaan buku tabungan	1.120.000	1.355.000
Lainnya	12.000.000	3.499.998
Jumlah Aset Lain-lain	<u>128.620.000</u>	<u>34.854.998</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KEWAJIBAN SEGERA

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023 (tidak diaudit)
Pajak penghasilan pasal 23	7.800.000	38.911.433
Pajak penghasilan pasal 21	5.613.450	2.658.450
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 deposito	861.666	543.333
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tabungan	271.917	389.753
Pajak penghasilan pasal 29	42.189	-
Pajak notaris	-	43.402
Titipan asuransi	43.402	1.399.925
Titipan BPJS Kesehatan	1.399.925	
Jumlah Kewajiban Segera	16.032.549	43.946.296

13. UTANG BUNGA

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023 (tidak diaudit)
Utang bunga deposito jatuh tempo	46.898.630	1.368.280
Jumlah Utang Bunga	46.898.630	1.368.280

14. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	2024	2023 (tidak diaudit)
Pajak penghasilan pasal 29	24.837.804	-
Jumlah	24.837.804	-

b. Perhitungan Beban Pajak Penghasilan

	2024	2023 (tidak diaudit)
Laba sebelum pajak	273.452.777	402.855.334
Koreksi fiskal :		
Sumbangan	1.220.000	-
Laba setelah fiskal	274.672.777	402.855.334
Pembulatan	274.672.000	402.855.000
Beban pajak penghasilan	30.213.920	44.356.275
Uang muka pajak penghasilan	5.376.116	-
Beban Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar	24.837.804	44.356.275

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. SIMPANAN

Akun ini terdiri dari

	2024	2023 (tidak diaudit)
Tabungan	759.784.288	996.282.259
Deposito Berjangka	19.105.000.000	815.000.000
Jumlah	19.864.784.288	1.811.282.259

a. Tabungan

	2024	2023 (tidak diaudit)
Pihak terkait	32.191.462	332.389.935
Pihak tidak terkait	727.592.826	663.892.324
Jumlah	759.784.288	996.282.259

Klasifikasi tabungan berdasarkan jenis penggunaannya :

Tabungan SIMUDA	759.784.288	996.282.259
Jumlah	759.784.288	996.282.259

Tingkat bunga rata-rata tabungan per tahun adalah sebesar 3% untuk tahun 2024.

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberikan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan tingkat bunga yang diberikan kepada pihak ketiga.

b. Deposito berjangka

	2024	2023 (tidak diaudit)
Pihak terkait	19.105.000.000	815.000.000
Pihak tidak terkait	-	-
Jumlah	19.105.000.000	815.000.000

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu :

1 Bulan	18.500.000.000	-
6 Bulan	-	-
12 Bulan	605.000.000	815.000.000
Jumlah	19.105.000.000	815.000.000

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka per tahun adalah sebesar 5.69% untuk tahun 2024.

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka yang diberikan kepada pihak berelasi diberikan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberikan kepada pihak ketiga.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023 (tidak diaudit)
Cadangan biaya pendidikan	71.726.500	109.044.000
THR	20.000.000	-
Lainnya	5.000.000	-
Titipan bonus karyawan	-	25.000.000
Jumlah Kewajiban Lain-lain	96.726.500	134.044.000

17. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Akun ini merupakan saldo kewajiban imbalan kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp10.820.000.

BPR tidak membentuk kewajiban imbalan kerja untuk tahun 2024 dikarenakan untuk seluruh karyawan termasuk dewan komisaris dan direksi merupakan tenaga kerja yang mulai bekerja (dipekerjakan kembali) pada November 2024.

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

2024			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
PT Infiniti Investama Indonesia	8.408.700	98,93%	8.408.700.000
Ir. Hendri Wirja Kusuma	91.300	1,07%	91.300.000
Jumlah Modal Disetor	8.500.000	100,00%	8.500.000.000

2023 (tidak diaudit)			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
Drg. Hengki Ganda Kusuma	780.000	60,00%	780.000.000
Mangiring Sihol Paria Lumantoruan	390.000	30,00%	390.000.000
Djoko Kusumowidagdo	130.000	10,00%	130.000.000
Jumlah Modal Disetor	1.300.000	100,00%	1.300.000.000

Berdasarkan akta No. 50 tanggal 15 November 2024 bahwa Modal dasar yang semula Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dan modal disetor BPR semula Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi menjadi 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) lembar saham masing-masing bernilai Rp1.000 (seribu Rupiah).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PENDAPATAN

	2024	2023 (tidak diaudit)
Bunga Antar Bank:		
Pendapatan bunga giro	4.296.213	-
Pendapatan bunga tabungan	26.287.020	15.711.878
Pendapatan bunga deposito berjangka	171.921.086	82.083.845
Jumlah Bunga Antar Bank	202.504.319	97.795.723
Bunga Kredit		
Bunga kontraktual	1.006.490.797	1.124.361.362
	1.006.490.797	1.124.361.362
	1.208.995.116	1.222.157.085
Provisi dan Adminsitrasi	72.121.300	83.757.521
Jumlah Pendapatan	1.281.116.416	1.305.914.606

20. BEBAN BUNGA

	2024	2023 (tidak diaudit)
Beban Bunga Kepada Pihak Bukan Bank		
Tabungan	23.403.343	20.502.348
Deposito Berjangka	100.738.691	33.452.826
Lainnya	4.950.744	2.661.243
	129.092.778	56.616.417
Jumlah Beban Bunga	129.092.778	56.616.417

21. PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN

Akun ini terdiri dari :	2024	2023 (tidak diaudit)
Pinalti pelunasan	19.475.000	-
Denda kredit yang diberikan	9.615.677	12.431.704
Penerimaan kredit hapus buku	9.000.000	75.500.000
Pendapatan administrasi kredit	6.300.000	-
Administrasi tabungan	5.225.163	5.412.023
Pembulatan kas	31.025	40.715
Penutupan tabungan	5.000	15.000
Pemulihan PPKA	-	8.629.438
Pendapatan lain	259.400	750.000
Jumlah Pendapatan Operasional Lain	49.911.265	102.778.880

22. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET (PPKA)

Akun ini terdiri dari:	2024	2023 (tidak diaudit)
PPKA - Kredit yang diberikan	7.705.080	68.378.329
PPKA - Penempatan pada bank lain	5.000.000	-
Jumlah Pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	12.705.080	68.378.329

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN PEMASARAN

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023 (tidak diaudit)
Reklame/promosi/iklan	5.000.000	400.000
Jumlah Beban Pemasaran	5.000.000	400.000

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023 (tidak diaudit)
Beban tenaga kerja	686.732.146	637.966.207
Beban sewa	67.500.000	60.000.000
Beban barang dan jasa	34.921.921	28.295.999
Beban penyusutan aset tetap	31.215.224	29.572.076
Beban pendidikan dan pelatihan	22.964.000	32.075.500
Beban pemeliharaan dan perbaikan	21.517.000	47.084.125
Beban pajak-pajak	4.984.000	4.295.899
Beban asuransi	770.000	767.000
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	870.604.291	840.056.806

25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023 (tidak diaudit)
Pembayaran SIPO OJK	10.040.800	10.000.000
Iuran Perbarindo	3.600.000	2.100.000
Fee kredit u/PMI	2.223.000	330.000
Sumbangan	1.220.000	290.000
Ongkos kirim	816.000	389.000
Administrasi bank	562.000	149.700
Rumah tangga kantor	-	2.038.300
Lainnya	21.710.955	22.458.000
Jumlah Beban Operasional Lainnya	40.172.755	37.755.000

26. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

	2024	2023 (tidak diaudit)
Beban Non Operasional		
Denda OJK/LPS	-	51.600
Lainnya	-	2.580.000
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	-	2.631.600

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA

Berikut saldo akun kepada pihak - pihak berelasi :

2024				
Kredit yang diberikan	Sifat Hubungan	Plafond	Baki Debet	Presentase terhadap modal Inti
Dedeng Hikamana	Keluarga manajemen kunci	15.000.000	8.250.000	0,07%
Aas Narsiah	Personil/manajemen kunci	47.000.000	40.472.220	0,32%
Dadang Sugandi	Keluarga manajemen kunci	18.000.000	14.625.000	0,12%
Jumlah		80.000.000	63.347.220	0,50%

2023 (tidak diaudit)				
Kredit yang diberikan	Sifat Hubungan	Plafond	Baki Debet	Presentase terhadap modal Inti
Dedeng Hikamana	Keluarga manajemen kunci	15.000.000	2.250.000	0,04%
Aas Narsiah	Personil/manajemen kunci	25.000.000	15.000.000	0,30%
Dadang Sugandi	Keluarga manajemen kunci	18.000.000	14.625.000	0,29%
Jumlah		58.000.000	31.875.000	0,63%

28. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

BPR memiliki tagihan dan kewajiban komitmen dan kontijensi dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023 (tidak diaudit)
Kontijensi		
Tagihan Kontijensi :		
Pendapatan bunga dan penyelesaian	83.282.000	166.977.000
Aset produktif hapus buku kontijensi lainnya	98.714.336	107.714.000
Total Tagihan Kontijensi	181.996.336	274.691.000

29. INFORMASI LAINNYA

Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah, seluruh lembaga jasa keuangan wajib menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Sesuai peraturan tersebut, BPR wajib menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasi dan menerapkan manajemen risiko atas prinsip mengenal nasabah dan melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan selambatnya 3 (tiga) hari setelah diketahui oleh BPR. BPR wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan secara efektif.

Direksi BPR bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. BPR telah menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang bertanggung langsung kepada Direksi sesuai dengan peraturan tersebut. Pada saat ini, manajemen BPR masih terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Perubahan Nama

PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Telagasari Utama berganti nama menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Hagati Wiradana Sejahtera berdasarkan Akta No. 20 tanggal 9 Januari 2025 oleh Notaris Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn. Akta ini juga merupakan akta perubahan anggaran dasar perseroan. Akta ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0000838.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025.

Pergantian nama ini telah disetujui Otoritas Jasa keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-41/KO.12/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Perubahan Nama PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Telagasari Utama menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Hagati Wiradana Sejahtera

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Standard Akuntansi Keuangan Entitas Private (SAK EP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat adalah peraturan yang mengatur kewajiban BPR membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi keuangan sejak tanggal 1 Januari 2025. Dalam hal ini, BPR tetap wajib menghitung PPKA, dimana selisih kurang PPKA yang wajib dibentuk dengan CKPN yang telah dibentuk akan diperhitungkan sebagai pengurang perhitungan modal inti.

Perhitungan dan pembentukan CKPN dilakukan dengan menggunakan PSAK 50/55. CKPN dibentuk ketika nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai lebih kecil dari nilai tercatat awal.

Dasar hukum mengenai CKPN adalah:

- UU No. 7 Tahun 1992
- UU No. 21 Tahun 2011
- UU No. 4 Tahun 2023

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT

POJK dan SAK adalah peraturan dan standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat. SAK EP berlaku efektif pada 1 Januari 2025. SAK EP merupakan adopsi dari IFRS for SMEs yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

31. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dewan Direksi telah menyelesaikan dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 pada tanggal 24 April 2025.

LAMPIRAN 2.
SURAT PERNYATAAN DIREKSI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Ir. Hendri Wirja Kusuma
- Alamat : Taman Modern Blok F2 No. 011, RT 15 RW 006 Ujung
Menteng, Cakung, Jakarta Timur
- Jabatan : Direktur Utama

dan

- Nama : Muhammad Nur, S.E.
- Alamat : Perumahan Taman Wisma Asri, Jl. Cempaka VI Blok T 27
No.147 TWA, RT.003 RW.030 Kelurahan Teluk Pucung,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat
- Jabatan : Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (YMFK)

dan

- Nama : Aas Narsiah, S.M.
- Alamat : Dusun Pasirkonci 01 RT. 003 RW 001, Lemahmakmur,
Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
- Jabatan : Direktur Operasional

bertindak untuk dan atas nama PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera menyatakan bahwa:

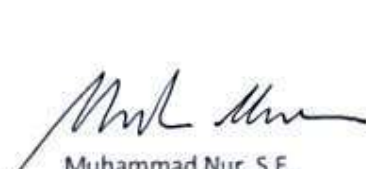
- 1) Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera;
- 2) Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
- 3) Semua data dan/atau informasi dalam Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera ini telah dimuat secara lengkap dan benar, serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4) Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera; dan
- 5) Efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera dinilai telah dilaksanakan secara memadai dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karawang, 24 April 2025



Ir. Hendri Wirja Kusuma
Direktur Utama



Muhammad Nur, S.E.
Direktur YMFK



Aas Narsiah, S.M.
Direktur Operasional

LAMPIRAN 3.

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2024

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola

Periode Tahun 2024

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola

Periode Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

Periode Tahun 2024

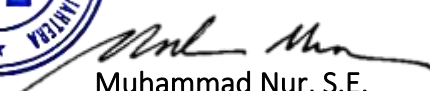
Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola ini telah disahkan dan disetujui di Karawang,
pada tanggal 24 April 2025

Disusun oleh:

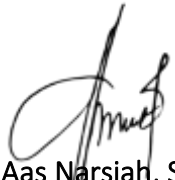

Ir. Hendri Wirja Kusuma

Direktur Utama




Muhammad Nur, S.E.

Direktur YMFK


Aas Narsiah, S.M.

Direktur Operasional

Diketahui/setujui oleh,



Harry Danui
Komisaris Utama



Drg. Hengky Ganda Kusuma
Komisaris

Kata Pengantar

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA, maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perekonomian Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir.

Karawang, 24 April 2025

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA	1
B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	1
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	1
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	3
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	6
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR.....	6
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	7
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	7
E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR.....	7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	7
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR.....	8
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS.....	8
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH DALAM PERBANDINGAN	9
I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN.....	9
J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	9
K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD).....	10
L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.....	10
M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	10

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN	10
--	----

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jl. Raya Telagasari No. 1, DS. Talagasari, Kecamatan Telagasari, Kelurahan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon	: (0267) 510909
Penjelasan Umum	: Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA, maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perekonomian Rakyat. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Hagati Wiradana Sejahtera telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Ir. Hendri Wirja Kusuma
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Membawahi Direktur Operasional, Direktur YMFK, PE Kredit, PE Audit Intern dan Marketing; b) Mengelola: 1) Fungsi penyaluran dana, meliputi: marketing, analis kredit, admin kredit

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

	2) Fungsi penghimpunan dana. 3) Fungsi pengadaan barang dan jasa; 4) Fungsi teknologi informasi; 5) Fungsi audit intern; 6) Fungsi rekrutmen, penempatan dan penggajian SDM.
2	Nama : Aas Narsiah, S.M.
	Jabatan : Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Membawahi: Staf Teller, Operasional, Collection & Remedial b) Mengelola: 1) Fungsi layanan nasabah, meliputi customer service dan teller; 2) Fungsi pendukung operasional, meliputi: akunting/pembukuan, perpajakan (perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan laporan pph badan, pph 21, pph 23, pph 4 (2), dan pelaporan keuangan reguler ke OJK dan LPS (Lapbul, BMPK, Laporan keuangan publikasi, Laporan LPS, OBOX), transfer, umum & administrasi. 3) Fungsi Bank relationship; 4) Fungsi collection & remedial.
3	Nama : Muhammad Nur, S.E.
	Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Membawahi: PE Kepatuhan, Risk Manajemen & APU PPT (termasuk fungsi Anti Fraud dan Integritas Laporan Keuangan) b) Mengelola: 1) Fungsi kepatuhan; 2) Fungsi manajemen risiko; 3) Fungsi penerapan APU-PPT; 4) Fungsi anti fraud; 5) Fungsi pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan BPR; 6) Fungsi penerapan keuangan berkelanjutan. 7) Fungsi penyusunan, pelaporan, monitoring rencana bisnis dan Tingkat Kesehatan BPR; 8) Fungsi perencanaan, penilaian kinerja, pendidikan & pelatihan, kebijakan SDM.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. BPR telah berhasil meningkatkan kredit sebesar Rp4.521.944 ribu atau naik 39,58% YOY, dan telah tumbuh 8,05% di atas proyeksi RBB; 2. BPR telah menyelesaikan kredit bermasalah sehingga NPL gross pada akhir tahun turun menjadi 1,08% dari tahun sebelumnya sebesar 4,39%; 3. BPR telah menyiapkan dengan baik penerapan SAK EP yang efektif mulai 1 Januari 2025. Dalam hal ini sistem <i>core banking</i> BPR telah dilakukan penyesuaian oleh vendor sehingga dapat menghitung CKPN berdasarkan perhitungan PD dan LGD secara otomatis melalui	

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

- sistem;
4. BPR telah mengikutsertakan SDM BPR pada berbagai pelatihan baik eksternal maupun internal selama tahun 2024 dengan total biaya sebesar Rp53.811 juta;
 5. Untuk penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Direksi telah:
 - a) Melakukan pemenuhan jumlah anggota Direksi;
 - b) Mengangkat Ihan Hadikusumah sebagai PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT, Teza Aditya sebagai PE Audit Intern pada Tanggal 15 November 2024;
 - c) Penyusunan/ revisi pedoman internal terkait penerapan Tata Kelola, antara lain tentang: Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, Piagam Audit Internal, Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan, Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman Anti Fraud, Pedoman Umum Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Pedoman Umum Manajemen Risiko dan Pedoman Remunerasi PE dan SDM BPR;
 - d) Monitoring dan penyempurnaan pelaporan ke OJK; dan
 - e) Pelaksanaan dan dokumentasi penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.
 - f) BPR telah melaporkan RBB periode 2025, pada tanggal 13 Desember 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
 6. Penyelesaian tindak lanjut temuan OJK antara lain:
 - a) Penyusunan/ revisi kebijakan SDM yang dituangkan dalam peraturan Perusahaan dan SOP intern (Pedoman Rekrutmen, Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai);
 - b) Pemenuhan PE Kepatuhan, PE Audit Intern dan PE Kredit;
 - c) Pemenuhan pengupahan sesuai UMP;
 - d) Evaluasi kebijakan perkreditan BPR;

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Harry Danui
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris; 3. Berkaitan dengan penerapan tata kelola pada BPR: a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling sedikit meliputi: 1) Aspek Pemegang Saham; 2) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi; 3) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris; 4) Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite; 5) Penanganan Benturan Kepentingan; 6) Penerapan Fungsi Kepatuhan; 7) Penerapan Fungsi Audit Intern; 8) Penerapan Fungsi Audit Ekstern; 9) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, Termasuk Sistem Pengendalian Intern;

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

	10) Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR; 11) Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi; 12) Rencana Bisnis BPR. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan keadaan atau perkiraan keadaan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada BPR: a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi; c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 5. Berkaitan dengan penerapan APU-PPT pada BPR: a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT yang diusulkan oleh Direksi; b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU-PPT; dan c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko penerapan program APU-PPT. 6. Menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis BPR sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen. 8. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. 9. Bersama dengan Direktur Utama menandatangani laporan pengangkatan atau pemberhentian PE AI, untuk disampaikan kepada OJK.
--	--

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

2	Nama : drg. Hengky Ganda Kusuma
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	1. Berkaitan dengan penerapan tata kelola pada BPR a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling sedikit meliputi: 1) Aspek Pemegang Saham; 2) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi; 3) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris; 4) Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite; 5) Penanganan Benturan Kepentingan; 6) Penerapan Fungsi Kepatuhan; 7) Penerapan Fungsi Audit Intern; 8) Penerapan Fungsi Audit Ekstern; 9) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, Termasuk Sistem Pengendalian Intern; 10) Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR; 11) Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi; 12) Rencana Bisnis BPR. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan keadaan atau perkiraan keadaan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. f. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 2. Berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada BPR: a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi; c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

	d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 3. Berkaitan dengan penerapan APU-PPT pada BPR: a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT yang diusulkan oleh Direksi; b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU-PPT; dan c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko penerapan program APU-PPT. 4. Menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis BPR sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen.
	Rekomendasi kepada Direksi 1. Agar Direksi meningkatkan penyaluran kredit dan memonitoring perkembangan usaha debitur; 2. Agar Direksi memonitor penyelesaian kredit bermasalah termasuk kredit dalam perhatian khusus; 3. Agar Direksi menyiapkan dengan baik implementasi SAK EP yang akan efektif di 1 Januari 2025; 4. Agar Direksi melakukan pengembangan dan pelatihan SDM; 5. Agar Direksi melakukan pemenuhan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara menyeluruh, antara lain: a) Pemenuhan jumlah anggota Direksi; b) Pemenuhan posisi PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT dan PE Audit Intern; c) Pemenuhan Penyusunan/ revisi pedoman internal terkait penerapan Tata Kelola, termasuk manajeme risiko & kepatuhan; dan d) Perbaikan Pelaksanaan dan dokumentasi penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris. e) Penyiapan Rencana Bisnis (RBB) periode 2025 6. Agar Direksi memonitor dan menyelesaikan tindak lanjut temuan OJK dan melakukan langkah pencegahan/ pengawasan agar tidak menjadi temuan berulang; 7. Agar Direksi memonitor integritas seluruh pelaporan ke OJK dan pihak lainnya.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Merujuk POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, mengingat modal inti BPR belum mencapai Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar), maka BPR belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.

Merujuk POJK No. 13 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, mengingat modal inti BPR belum mencapai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar), maka BPR belum membentuk Komite Manajemen Risiko.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal 2024 (Rp)	Persentase Kepemilikan 2024 (%)	Nominal 2023 (Rp)	Persentase Kepemilikan 2023 (%)
1)	Ir. Hendry Wirja Kusuma	Rp91.300.000	1,07%	Rp0	0%
2)	Aas Narsiah, S.M	Rp0	0%	Rp0	0%
3)	Muhammad Nur, SE	Rp0	0%	Rp0	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal 2024 (Rp)	Persentase Kepemilikan 2024 (%)	Nominal 2023 (Rp)	Persentase Kepemilikan 2023 (%)
1)	Harry Danui	Rp0	0%	Rp0	0%
2)	Hengky Ganda Kusuma, drg	Rp0	0%	Rp780.000.000	60%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1)	Ir. Hendry Wirja Kusuma	-	-	0%
2)	Aas Narsiah, S.M	-	-	0%
3)	Muhammad Nur, SE	-	-	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1)	Harry Danui	-	-	0%
2)	Hengky Ganda Kusuma, drg	-	-	0%

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1)	Ir. Hendry Wirja Kusuma	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2)	Aas Narsiah, S.M	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3)	Muhammad Nur, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1)	Harry Danui	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2)	Hengky Ganda Kusuma, drg	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1)	Ir. Hendry Wirja Kusuma	Tidak Ada	Tidak Ada	tidak ada
2)	Aas Narsiah, S.M	Tidak Ada	Tidak Ada	tidak ada
3)	Muhammad Nur, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1)	Harry Danui	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2)	Hengky Ganda Kusuma, drg	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	90,000,000	2	84,000,000
2.	Tunjangan	1	42,000,000	-	-
3.	Tantiem	1	11,000,000	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	0	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	0	-	-	-
Total Remunerasi			143,000,000		84,000,000
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-
3.	Asuransi kesehatan	1	4,320,000	-	-
4.	Fasilitas lainnya	1	5,596,800	-	-
Total Fasilitas Lain			9,916,800		
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			152,916,800		84,000,000

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH DALAM PERBANDINGAN

Keterangan	Perbandingan		
	(a/b)		
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.61	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.33	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.75	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.07	:	1

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1.	25 Jan 2024	2	1. Review penyaluran kredit sampai dengan periode 31 Des 2023; 2. Review pengembangan dan pelatihan SDM.
2.	25 Apr 2024	2	1. Review penyelesaian kredit dalam perhatian khusus & bermasalah; 2. Review penyaluran kredit.
3.	5 Jul 2024	2	1. Review persiapan implementasi SAK EP; 2. Review penyaluran kredit.
4.	18 Okt 2024	2	1. Review penerapan Manajemen Risiko; 2. Review persiapan penyusunan Rencana Bisnis periode tahun 2025.
5.	20 Nov 2024	2	1. Penetapan Perubahan Struktur Organisasi BPR; 2. Penetapan Perubahan Waktu Kerja; 3. Penetapan Kebijakan Penempatan Deposito pada Bank Lain; 4. Remunerasi SDM.
6.	12 Des 2024	2	1. Review Kinerja Keuangan per Nov 2024 dan realisasi terhadap RBB Semester II 2024; 2. Penetapan Rencana Bisnis BPR 2025-2027; 3. Penetapan Kebijakan BPR; 4. Pemantauan Tindak Lanjut Audit OJK; 5. Pemantauan Kewajiban Penyampaian Laporan BPR; 6. Rencana Audit Intern Tahun 2025.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Ir. Mangiring L. Toroean	3	1	66.67%
2.	Harry Danui	2	-	33.33%
3.	Hengky Ganda Kusuma, drg	5	1	66.67%

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA
K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	Nihil

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20-Feb-24	Sosial	Sumbangan peringatan Isro Mi'raj Mushola Miftahul Muslimin	Panitia Pengurus Mushola Miftahul Muslimin	50,000
2	22-Feb-24	Sosial	Sumbanga Isra mi'raj Masjid Jami Al-Ibrohimiyah	Panitia Pengurus Masjid Jami Al-Ibrohimiyah	100,000
3	5-Apr-24	Sosial	Pemberian THR Marbot Mesjid Al Ibrohimiyah	Pengurus Mesjid Al Ibrohimiyah	100,000
4	12-Jul-24	Sosial	Santunan anak yatim & jompo (Majlis Ta'lim Miftahul Muslimin)	Pengurus Majlis Ta'lim Miftahul Muslimin	50,000

PT BPR HAGATI WIRADANA SEJAHTERA

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
5	23-Sep-24	Sosial	Sumbangan Majelis Ta'lim Nurul amal (Maulid Nabi Muhammad SAW)	Pengurus Majelis Ta'lim Miftahul Muslimin	50,000
6	15-Okt-24	Sosial	Sumbangan Maulid Nabi Muhammad SAW Mesjid Al Ibrohimiyah	Panitia Pengurus Masjid Jami Al-Ibrohimiyah	100,000
7	16-Okt-24	Sosial	Menjenguk anak karyawan an Teza Aditya yang sedang Sakit	Teza Aditya	300,000
Total					750,000